



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

**NOMOR: 4/KB/BTD-2023
172/4/KSP/DPRD-TD/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 4 /KB/BTD-2023
NOMOR : 172/ 4 /KSP/DPRD-TD/2023

TANGGAL : 25 Agustus 2023

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : EKA PUTRA, SE.,MM
Jabatan : Bupati Tanah Datar
Alamat Kantor : Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
2. a. Nama : H.RONY MULYADI DT. BUNGSU, SE
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung
b. Nama : H.SAIDANI, SP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung
c. Nama : ANTON YONDRA, SE.,MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan.....

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023, perubahan prioritas belanja daerah, perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Belanja serta rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Batusangkar, 25 Agustus 2023

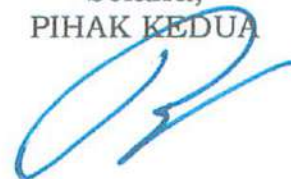
BUPATI TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK PERTAMA



EKA PUTRA, SE.,MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

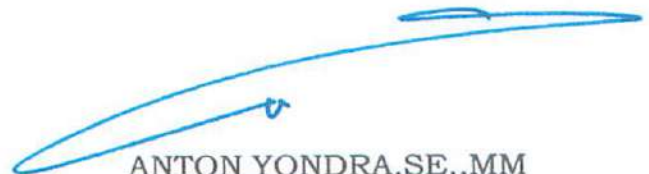
Selaku,
PIHAK KEDUA



H. RONY MULYADI DT. BUNGSU, SE
KETUA



H. SAIDANI, SP
WAKIL KETUA



ANTON YONDRA, SE., MM
WAKIL KETUA

**LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PERUBAHAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
A	PENERIMAAN DAERAH	1,300,969,192,850.00	1,341,812,179,178.00	40,842,986,328.00
I	PENDAPATAN	1,240,719,192,850.00	1,254,101,878,310.00	13,382,688,460.00
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	140,021,755,000.00	142,207,414,769.00	2,185,659,769.00
	Pajak Daerah	26,338,830,939.00	28,338,830,939.00	2,000,000,000.00
	Retribusi Daerah	10,049,083,800.00	10,049,083,800.00	-
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23,922,855,800.00	24,108,515,569.00	185,659,769.00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	79,710,984,461.00	79,710,984,461.00	-
2	PENDAPATAN TRANSFER	1,097,377,437,850.00	1,108,574,463,541.00	11,197,026,691.00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,041,982,866,000.00	1,032,356,856,935.00	(9,626,009,065.00)
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	55,394,571,850.00	76,217,606,606.00	20,823,034,756.00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3,320,000,000.00	3,320,000,000.00	-
	Pendapatan Hibah	3,320,000,000.00	3,320,000,000.00	-
	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-
II	PEMBIAYAAN DAERAH	60,250,000,000.00	87,710,300,868.00	27,460,300,868.00
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	60,250,000,000.00	87,710,300,868.00	27,460,300,868.00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	60,250,000,000.00	87,710,300,868.00	27,460,300,868.00
B	PENGELUARAN DAERAH	1,300,969,192,850.00	1,341,812,179,178.00	40,842,986,328.00
I	BELANJA	1,299,969,192,850.00	1,340,812,179,178.00	40,842,986,328.00
1	BELANJA OPERASI	978,207,088,651.00	1,022,072,345,730.00	43,865,257,079.00
	Belanja Pegawai	590,833,574,518.00	613,976,183,780.00	23,142,609,262.00
	Belanja Barang dan Jasa	349,294,142,390.00	362,381,680,207.00	13,087,537,817.00
	Belanja Subsidi	575,000,000.00	575,000,000.00	-
	Belanja Hibah	27,983,522,120.00	36,574,122,120.00	8,590,600,000.00
	Belanja Bantuan Sosial	9,520,849,623.00	8,565,359,623.00	(955,490,000.00)
2	BELANJA MODAL	153,739,305,461.00	146,834,040,015.00	(6,905,265,446.00)
	Belanja Modal Tanah	-	410,000,000	410,000,000.00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47,238,201,757.00	46,804,493,097.00	433,708,660.00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46,085,749,374.00	38,393,197,892.00	(7,692,551,482.00)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	55,963,738,980.00	57,589,120,180.00	1,625,381,200.00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,178,615,350.00	3,602,228,846.00	(576,386,504.00)
	Belanja Modal Aset Lainnya	273,000,000.00	35,000,000.00	(238,000,000.00)
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5,000,000,000.00	3,619,486,800.00	(1,380,513,200.00)
	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	3,619,486,800.00	(1,380,513,200.00)
4	BELANJA TRANSFER	163,022,798,738.00	168,286,306,633.00	5,263,507,895.00
	Belanja Bagi Hasil	4,529,430,588.00	4,822,438,483.00	293,007,895.00
	Belanja Bantuan Keuangan	158,493,368,150.00	163,463,868,150.00	4,970,500,000.00

4. BELANJA.....

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
II	PEMBIAYAAN DAERAH	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
		-		

BATUSANGKAR, 28 AGUSTUS 2023

BUPATI TANAH DATAR
selaku,
PIHAK PERTAMA



EKA PUTRA, SE, MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

selaku,
PIHAK KEDUA



H. RONY MULYADI DT. BUNGSU, SE
KETUA DPRD



H. SAIDANI, SP
WAKIL KETUA DPRD



ANTON YONDRA, SE, MM
WAKIL KETUA DPRD

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN	II-1
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH	III-1
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	IV-1
BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023	II-3
Tabel 4.1	Perubahan Plafon Anggaran menurut urusan pemerintah daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2023	IV-1
Tabel 4.2	Perubahan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD	IV-2
Tabel 4.3	Plafon Anggaran per Perangkat Daerah Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023	IV-3
Tabel 4.4	Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023	IV-6
Tabel 4.5	Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Perubahan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023	IV-7
Tabel 5.1	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	V-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses penyusunan dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2023 pada dasarnya merupakan salah satu tahapan dari proses penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2023. Plafon sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah peraturan daerah tentang Perubahan APBD disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

Sesuai dengan maksud pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi : a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran; b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; c) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; d) keadaan darurat dan; e) keadaan luar biasa.

Substansi Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas Perangkat Daerah. Disamping itu PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara untuk masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan kewenangan dan urusan pemerintah.

Sebagai bagian dari dokumen perubahan penganggaran Tahun 2023, Rancangan perubahan PPAS ini menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, yang tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Tanah Datar ke depan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini terselenggara serta upaya peningkatan pasca pemulihan pandemi Covid-19 yang terjadi mulai tahun 2021. Perubahan

PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 menggambarkan pagu anggaran sementara untuk pendapatan, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, serta pembiayaan.

1.2. Tujuan

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Prioritas Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap urusan serta Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing program/kegiatan;
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007



Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

- keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Seri E);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
 35. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



36. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (ii) Pendapatan Transfer dan (iii) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan Potensi Daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas Otonomi Daerah. Semakin tinggi kualitas Otonomi Daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar pada Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 mempertimbangkan kondisi makro ekonomi secara Nasional, Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar. serta percepatan peningkatan perekonomian pasca pemulihan dampak pandemi Covid-19, terutama pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan daerah pada Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.1,254,101,878,310.00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.13,382,685,460.00 atau 1,08% dari Rp.1,240,719,192,850.00 pada APBD Tahun Anggaran 2023.

Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar Rp.2,185,659.769.00 atau 1.56% dari Rp.140,021,755,000.00 pada APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp.142.207.414.769.00 pada Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari:
 - a) Pajak Daerah, diprediksi mengalami peningkatan sebesar Rp.2.000.000.000.00 dari Rp.26.338.830.939,00 pada APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp.28.338.830.939,00 pada Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.
 - b) Retribusi Daerah, diprediksi tetap dan tidak mengalami perubahan pada Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu dengan nominal Rp.10,049,083,800.00.
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, diprediksi mengalami peningkatan sebesar Rp.185.659.769,00 dari Rp.23,922,855,800.00 pada APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp.24.108.515.569,00 pada Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.
 - d) Lain-lain PAD yang Sah, diprediksi tetap dan tidak mengalami perubahan pada Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu dengan nominal Rp.79,710,984,461.00.
2. Pendapatan Transfer pada Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1,108,574,463,541.00 yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1,032,356,856,935.00 antara lain Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa.
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.76,217,606,606.00 yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.



3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.3,320,000,000.00 pada Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Pendapatan Hibah sebesar Rp.3,320,000,000.00 pada Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Target perubahan pendapatan daerah pada Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2023

KODE	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	+/-
4.	PENDAPATAN DAERAH	1,240,719,192,850.00	1,254,101,878,310.00	13,382,685,460.00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	140,021,755,000.00	142,207,414,769.00	2,185.659.769.00
4.1.01.	Pajak Daerah	26,338,830,939.00	28,338,830,939.00	2,000,000,000.00
4.1.02.	Retribusi Daerah	10,049,083,800.00	10,049,083,800.00	-
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23,922,855,800.00	24.108.515.569.00	185.659.769.00
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	79,710,984,461.00	79,710,984,461.00	-
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1,097,377,437,850.00	1,108,574,463,541.00	11,197,025,691.00
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,041,982,866,000.00	1,032,356,856,935.00	(9,626,009,065.00)
4.2.02.	Pendapatan Tranfer Antar Daerah	55,394,571,850.00	76,217,606,606.00	20,823,034,756.00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3,320,000,000.00	3,320,000,000.00	-
4.3.01.	Pendapatan Hibah	3,320,000,000.00	3,320,000,000.00	-
4.3.02.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menjabarkan program dan kegiatan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023, telah diselaraskan dengan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 serta mendukung prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2023.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Kebijakan yang terkait dengan belanja daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai
 - a) Penambahan belanja pegawai merupakan penyesuaian dengan mempedomani realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan serta Belanja Pegawai lainnya.
 - b) Pengalokasian anggaran untuk belanja tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).
- 2) Belanja Barang dan Jasa
Penyesuaian Anggaran Belanja Barang dan Jasa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022 serta untuk mendukung penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan

Dampaknya. Serta akibat dari pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pergeseran Anggaran Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Transfer yang merupakan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Nagari.

3) Belanja Subsidi

Penyesuaian belanja subsidi merupakan penyesuaian terhadap pemberian subsidi bunga kepada pelaku usaha ekonomi lemah UMKM dalam rangka memerangi praktek-praktek rentenir ditengah masyarakat.

4) Belanja Hibah

Merupakan penganggaran belanja hibah untuk, antara lain organisasi kemasyarakatan, masjid, partai politik, lembaga pendidikan, hibah air minum dan sanitasi.

5) Belanja Bantuan Sosial

Merupakan penganggaran belanja bantuan sosial untuk, antara lain bantuan pendidikan, disabilitas, lanjut usia dan bantuan untuk panti asuhan.

6) Belanja Modal

Merupakan penganggaran pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya

7) Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil

Penyesuaian belanja Bagi hasil kepada Pemerintah desa/nagari akibat perubahan Alokasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah, dan Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dari Provinsi Sumatera Barat, serta Penggunaan Silpa Tahun Anggaran 2022.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Penyesuaian belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah desa/nagari akibat perubahan Alokasi Pendapatan Dana Transfer Umum dari Pemerintah dan Pergeseran dari jenis Belanja Barang dan Jasa ke belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah desa/nagari.

8) Belanja Tidak Terduga

kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial serta bantuan sosial tidak terencana.

Belanja daerah Kabupaten Tanah Datar pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.1,340,812,179,178.00 Belanja daerah terdiri dari Kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp.1,022,072,345,730.00 pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal sebesar Rp.146,834,040,015.00 pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
Merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. Pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp3.619.486.800,00.
4. Belanja Transfer sebesar Rp.168,286,306,633.00 pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023, terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi Hasil
Merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah dan Bagi hasil Pajak air permukaan kepada Pemerintahan Desa/Nagari. Pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.4,822,438,483.00.

- b. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.

Merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah Nagari, yang bersifat umum dan bersifat khusus. Pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.163,463,868,150.00.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 diarahkan dalam bentuk :

- a. Pemenuhan gaji dan tunjangan, serta Belanja Tambahan Penghasilan ASN.
- b. Mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk pemenuhan 7 (delapan) prioritas pembangunan yang tersebar pada urusan wajib dan urusan pilihan.
- c. Penganggaran kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- d. Penganggaran untuk mendukung program nasional untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
- e. Pemecahan terhadap masalah mendesak antara lain penanganan bencana alam dan kerawanan sosial.
- f. Memprioritaskan program dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya.
- g. Pencapaian target SPM, *Mandatory Spending*, dan penanganan *Stunting*.

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Cakupan pembinaan dan pengawasan hubungan industrial perusahaan dan pekerja		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Panganan pangan		
				Dinas Pangan dan Perikanan	
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
			Koperasi yang difasilitasi untuk penerbitan izin		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Pemeriksaan dan Pengawasan Terhadap KSP/USP		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
			Koperasi Simpan Pinjam yang dinilai tingkat kesehatannya		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Konversi Kelembagaan Koperasi ke Pola Syariah		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			Peningkatan SDM Pengelola Koperasi		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
			Penerapan Koperasi Modern dan Berbasis Digital		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Jumlah Wirausaha Baru yang dibina		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Usaha Mikro yang difasilitasi kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan administrasi kantor yang ditata Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga		
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Meningkatnya daya tarik objek wisata unggulan		
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Tanah Datar		
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
			Peningkatan Kapasitas Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan administrasi kantor yang ditata pada Dinas Pertanian		
				Dinas Pertanian	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		
				Dinas Pertanian	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			persentase layanan jasa medik veteriner		
				Dinas Pertanian	
			Persentase Penurunan Kasus Penyakit Menular		
				Dinas Pertanian	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Usaha Pertanian		
				Dinas Pertanian	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Meningkatnya SDM Para Penyuluh Pertanian dan Para Petani		
				Dinas Pertanian	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
			Peningkatan Jumlah Pedagang Formal dan Informal		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Cakupan Pasar Layak		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			Terpantaunya Fluktuasi Harga Kebutuhan Pokok dan Brang Strategis Lainnya		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Fasilitasi Ekspor Produk Unggulan Daerah		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Fasilitasi pelaksanaan standardisasi dan perlindungan konsumen pada unit metrologi		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			Meningkatnya akurasi alat ukur UTTP melalui tera dan tera ulang		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Fasilitasi Pemasaran Produk dan Komoditi UMKM berbasis digital		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Pengembangan IKM Sentra Tenun dan Pengembangan IKM Pada sentra IKM Potensial		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Peningkatan Produk IKM yang bersertifikat		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			Jumlah IKM yang terdaftar dalam SINAS		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan adminsitrası kantor yang ditata pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai peningkatan mutu standar nasional pendidikan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
			Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum nasional dan muatan lokal		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan administrasi kantor yang ditata		
				Dinas Kesehatan	
			Cakupan administrasi kantor yang ditata pada Dinas Sosial PPA		
				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Tingkat partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		
				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase terlayannya dan terbedayakannya PMKS di Kabupaten Tanah Datar		
				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase pelayanan dan jaminan sosial bagi PMKS		
				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
			Persentase Cakupan Ketersediaan Database dan Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja Daerah		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Peningkatan persentase (%) Pencari Kerja yang Kompeten		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase Penurunan Angka Pengangguran		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Meningkatnya wawasan dan kesadaran terkait kekerasan terhadap perempuan		
				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
			Jumlah profil gender dan profil anak		
				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Tingkat pemenuhan hak anak		
				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			Prevalensi kekerasan terhadap anak		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Persentase peningkatan pemberdayaan dan pelayanan kelembagaan masyarakat desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Pasangan usia subur tidak ingin anak lagi (unmeet ned) tidak terlayani KB		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Persentase keaktifan poktan		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Peningkatan Daya Saing Keolahragaan		
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
			Peningkatan Kapasitas Kepramukaan		
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Persentase peningkatan pemberdayaan dan pelayanan kelembagaan masyarakat desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Jumlah OPK yang dikelola		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
			Jumlah sanggar seni yang aktif		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
			Jumlah sejarah lokal yang digali		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Jumlah cagar budaya yang dipublikasikan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
			Jumlah museum yang dikelola		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		
				Sekretariat Daerah	
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
			TMP yang dipelihara secara periodik		
				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan administrasi kantor yang ditata		
				Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan		
				Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			
			cakupan pengelolaan dan pengembangan energi baru terbarukan		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
			Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan Energi Baru Terbarukan		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan administrasi kantor yang ditata		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase penanganan bencana yang ditangani		
				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan administrasi perkantoran yang ditata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Cakupan kualitas dan kuantitas layanan pendaftaran penduduk		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
			Persentase pendayagunaan data kependudukan untuk semua keperluan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan administrasi perkantoran yang ditata		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENATAAN DESA			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase peningkatan penataan desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
			Jumlah nagari yang melakukan kerjasama		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase pelayanan administrasi pemerintahan desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			
			Jumlah regulasi izin penggunaan arsip yang dikeluarkan		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan administrasi kantor yang ditata		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Cakupan Data Evaluasi tentang Kebijakan Perekonomian Daerah, Administrasi Pembangunan dan prinsip pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan administrasi kantor yang ditata pada Baperlitbang		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Capaian Program kinerja daerah terhadap perencanaan Pembangunan Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase kosistensi antar dokumen perencanaan bidang PPM, bidang Perekonomian dan SDA dan bidang infrastruktur dan kewilayahan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan administrasi kantor yang ditata pada Badan Keuangan Daerah		
				Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Cakupan administrasi kantor yang ditata Badan Kepegawaian		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Jumlah pendampingan serta asistensi terkait kebijakan reformasi birokrasi, penegakan integritas yang dilaksanakan, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan peningkatan kapabilitas APIP menuju level 3		
				Inspektorat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan administrasi kantor yang ditata		
				Kecamatan Batipuh Selatan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum		
				Kecamatan X koto	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa		
				Kecamatan X koto	

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
90	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan adminsitras kantor yang ditata pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	266.431.849.388
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai peningkatan mutu standar nasional pendidikan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	350.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan administrasi kantor yang ditata		
				Dinas Kesehatan	71.640.000

				Dinas Kesehatan	2.981.117.990
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		
				Rumah Sakit Umum Daerah	56.000.000.000

				Rumah Sakit Umum Daerah	38.261.875.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			

				Dinas Kesehatan	453.163.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			

				Dinas Kesehatan	542.759.800
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan administrasi kantor yang ditata pada Dinas Sosial PPA		
				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.708.694.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Tingkat partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	336.895.000
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase terlayannya dan terbedayakannya PMKS di Kabupaten Tanah Datar	
				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.556.198.500
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase pelayanan dan jaminan sosial bagi PMKS	
				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.179.300.000
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Wawasan perempuan bidang ekonomi	
				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40.000.000
				Wawasan perempuan bidang hukum	
				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40.000.000
				Wawasan perempuan bidang politik	
				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40.000.000

				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	517.000.000
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Meningkatnya wawasan dan kesadaran terkait kekerasan terhadap perempuan	
				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27.000.000
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
				Jumlah profil gender dan profil anak	
				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.000.000
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Tingkat pemenuhan hak anak	

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	49.914.500
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			Prevalensi kekerasan terhadap anak		
				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	70.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan administrasi perkantoran yang ditata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	43.153.000
			Cakupan administrasi perkantoran yang ditata		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.020.000
			Presentase unit kerja yang terlayani administrasi perkantoran		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21.346.659
			Cakupan administrasi kantor yang ditata pada Baperlitbang		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8.000.000
			Cakupan administrasi kantor yang ditata Badan Kepegawaian		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.497.824.000
			Cakupan administrasi kantor yang ditata		
				Kecamatan X koto	1.994.069.520
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari		
				Kecamatan X koto	13.646.300
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase ketentraman dan ketertiban umum		
				Kecamatan X koto	12.100.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum		
				Kecamatan X koto	73.812.742
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa		
				Kecamatan X koto	104.500.000
92	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah				
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Jumlah OPK yang dikelola		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
			Jumlah sejarah lokal yang digali		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	70.000.000
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		
				Sekretariat Daerah	27.693.915.990
97	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Dinas Pangan dan Perikanan	31.546.840
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Panganan pangan		
				Dinas Pangan dan Perikanan	225.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan administrasi kantor yang ditata pada Dinas Pertanian		
				Dinas Pertanian	250.000.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		
				Dinas Pertanian	1.072.561.600
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase Peningkatan fungsi Prasarana Pertanian		
				Dinas Pertanian	490.796.339
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Usaha Pertanian		
				Dinas Pertanian	100.000.000
99	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	7.193.000
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			cakupan upaya peningkatan realisasi investasi di daerah		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	250.000.000
			Terlaksananya Upaya Peningkatan Realisasi Investasi di Daerah		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	250.000.000
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Pengembangan IKM Sentra Tenun dan Pengembangan IKM Pada sentra IKM Potensial		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	650.000.000
101	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan				
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			

				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	50.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Meningkatnya daya tarik objek wisata unggulan		
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	1.746.251.520
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Meningkatnya SDM Para Penyuluh Pertanian dan Para Petani		
				Dinas Pertanian	505.000.000
102	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	11.096.185.800
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			

				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	4.995.993.200
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			

				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	3.350.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			

				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	2.000.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			

				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	400.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			

				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	750.000.000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			

				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	627.993.200
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			

				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	13.007.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			

				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	166.000.000

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			

				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	700.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terdampak bencana alam dan yang terkena relokasi program		
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	10.000.000
			Penyediaan data terkait perumahan dilokasi rawan bencana		
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	10.000.000
			Rekomendasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan		
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	10.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan administrasi kantor yang ditata		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.000.000
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			

				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	50.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH			

				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	750.000.000
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			

				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	135.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	15.000.000

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Cakupan administrasi kantor yang ditata		
				Dinas Perhubungan	10.000.000
104	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan administrasi kantor yang ditata		
				Dinas Kesehatan	67.510.083.800
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			

				Dinas Kesehatan	32.255.750
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10.000.000
			Cakupan administrasi perkantoran yang ditata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.850.442.500

				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	214.177.500
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Cakupan kualitas dan kuantitas layanan pendaftaran penduduk		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	424.000.000
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			

				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	155.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Cakupan kualitas dan kuantitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
			Persentase pendayagunaan data kependudukan untuk semua keperluan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.000.000

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase pelayanan administrasi pemerintahan desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.322.631.200
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Pasangan usia subur tidak ingin anak lagi (unmeet ned) tidak terlayani KB		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.150.580.200
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Dinas Komunikasi dan Informatika	5.600.000
			Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	200.000.000
			Lancarnya pelaksanaan tugas		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.976.625.341
			Lancarnya Pelaksanaan Tugas		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40.000.000
			Presentase unit kerja yang terlayani administrasi perkantoran		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	70.000.000
			Terlaksananya kegiatan diklat ASN		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.000.000
			Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	183.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Jumlah perpustakaan yang memenuhi standar nasional		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	157.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Presentase unit kerja yang terlayani administrasi perkantoran		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			OPD/Nagari yang menerapkan arsip secara baku		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	74.000.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			Terpeliharanya arsip/dokum daerahen		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan administrasi kantor yang ditata		
				Sekretariat Daerah	33.458.967.787
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		
				Sekretariat Daerah	1.991.490.691
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Cakupan Data Evaluasi tentang Kebijakan Perekonomian Daerah, Administrasi Pembangunan dan prinsip pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku		
				Sekretariat Daerah	1.904.300.431
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Sekretariat DPRD	29.403.633.000
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Persentase Ranperda yang dibahas sehingga menjadi Perda dan terlaksananya Koordinasi, Konsultasi dan pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD		
				Sekretariat DPRD	30.992.929.307
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan administrasi kantor yang ditata pada Baperlitbang		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	6.181.279.550

				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	30.000.000
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Capaian Program kinerja daerah terhadap perencanaan Pembangunan Daerah		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	704.000.000
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan bidang PPM, bidang Perekonomian dan SDA dan bidang infrastruktur dan kewilayahan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	800.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan administrasi kantor yang ditata pada Badan Keuangan Daerah		
				Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.950.561.400

				Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.030.916.900
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah		
				Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	155.884.784.588
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			

				Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.796.905.685
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan administrasi kantor yang ditata Badan Kepegawaian		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.250.000
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			

				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	709.942.450
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Inspektorat	10.000.000
			Cakupan administrasi kantor yang ditata		
				Kecamatan X koto	27.791.930
				Kecamatan Batipuh	30.771.523
				Kecamatan Batipuh Selatan	30.000.000

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum		
				Kecamatan Batipuh	91.830.212
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa		
				Kecamatan Batipuh	103.500.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan administrasi kantor yang ditata		
				Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	4.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			Persentase kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan yang berlaku		
				Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.232.684.400

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penuntasan penanganan Covid 19 dan permasalahan kesehatan lainnya						

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					Dinas Kesehatan	15.000.000	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				

					Dinas Kesehatan	105.000.000	
2	Peningkatan pengalaman agama, adat dan budaya						
		Meningkatnya pembangunan adat dan budaya					
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
				Jumlah OPK yang dikelola			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
				Jumlah sanggar seni yang aktif			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	360.000.000	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
				Jumlah sejarah lokal yang digali			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	70.000.000	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
				Jumlah cagar budaya yang dipublikasikan			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	130.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
				Jumlah museum yang dikelola			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.000.000	
		Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat					
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat			
					Sekretariat Daerah	55.387.831.980	
3	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi						
		Meningkatnya Daya Saing UMKM, Koperasi dan ekonomi kreatif					
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
			cakupan upaya peningkatan realisasi investasi di daerah				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	500.000.000	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
				Pengembangan IKM Sentra Tenun dan Pengembangan IKM Pada sentra IKM Potensial			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.300.000.000	
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja					
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
			Terlaksananya Upaya Peningkatan Realisasi Investasi di Daerah				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	250.000.000	
		Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan administrasi kantor yang ditata pada Dinas Pertanian				
					Dinas Pertanian	32.160.192.000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian			
					Dinas Pertanian	18.920.380.722	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
				Persentase Peningkatan fungsi Prasarana Pertanian			
					Dinas Pertanian	3.792.403.478	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
				Persentase Penurunan Kasus Penyakit Menular			
					Dinas Pertanian	1.484.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
				Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			
					Dinas Pertanian	1.320.000.000	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
				Meningkatnya SDM Para Penyuluh Pertanian dan Para Petani			
					Dinas Pertanian	2.947.000.000	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					Dinas Pangan dan Perikanan	31.546.840	
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	7.193.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
				persentase layanan jasa medik veteriner			
					Dinas Pertanian	100.000.000	
4	Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian						
		Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian					
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				
				Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Panganan pangan			
					Dinas Pangan dan Perikanan	450.000.000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
				Persentase Peningkatan fungsi Prasarana Pertanian			
					Dinas Pertanian	981.592.678	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Usaha Pertanian			
					Dinas Pertanian	200.000.000	
5	Peningkatan daya saing pariwisata unggulan daerah						
		Peningkatan Daya Saing Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi potensial					
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
				Meningkatnya daya tarik objek wisata unggulan			
					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	3.492.503.040	

			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				

					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	864.790.000	
6	Peningkatan kualitas SDM						
		Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan administrasi kantor yang ditata pada Dinas Sosial PPA			
					Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.126.082.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
				Tingkat partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial			
					Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.010.685.000	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
				Persentase terlayannya dan terbedayakannya PMKS di Kabupaten Tanah Datar			
					Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.668.595.500	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase pelayanan dan jaminan sosial bagi PMKS			
					Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.537.900.000	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
				Wawasan perempuan bidang ekonomi			
					Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	120.000.000	
				Wawasan perempuan bidang hukum			
					Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	120.000.000	
				Wawasan perempuan bidang politik			
					Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	120.000.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
				Meningkatnya wawasan dan kesadaran terkait kekerasan terhadap perempuan			
					Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	81.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
				Jumlah profil gender dan profil anak			
					Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	75.000.000	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
				Tingkat pemenuhan hak anak			
					Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	149.743.500	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
				Prevalensi kekerasan terhadap anak			
					Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	210.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan administrasi perkantoran yang ditata			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.060.000	
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan administrasi kantor yang ditata			
					Dinas Kesehatan	942.166.600	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				Cakupan sumber daya manusia kesehatan yang kompeten			
					Dinas Kesehatan	14.000.000	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
				Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman			
					Dinas Kesehatan	107.680.000	
			Meningkatnya mutu pendidikan				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan adminisitrasi kantor yang ditata pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	266.431.849.388	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				Persentase satuan pendidikan yang mencapai peningkatan mutu standar nasional pendidikan			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.693.800.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum nasional dan muatan lokal			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	110.000.000	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					Dinas Kesehatan	17.833.541.162	
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			
					Rumah Sakit Umum Daerah	56.000.000.000	

					Rumah Sakit Umum Daerah	38.261.875.000	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				

					Dinas Kesehatan	28.893.326.188	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				

					Dinas Kesehatan	85.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				

					Dinas Kesehatan	645.013.800	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				

					Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	517.000.000	
7	Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup						
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah					
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
				Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terdampak bencana alam dan yang terkena relokasi program			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	10.000.000	
			Penyediaan data terkait perumahan dilokasi rawan bencana				
					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	10.000.000	
			Rekomendasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan				
					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	10.000.000	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	11.197.969.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	6.095.993.200	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	3.350.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	2.000.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	400.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	750.000.000	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	627.993.200	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	11.607.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	166.000.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	700.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan administrasi kantor yang ditata			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.000.000	
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	50.000.000	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	750.000.000	
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				

					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	135.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	15.000.000	
				Cakupan administrasi kantor yang ditata			
					Dinas Perhubungan	10.000.000	
8	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas						
		Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak					
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
				Persentase pelayanan administrasi pemerintahan desa			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.967.893.600	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
				Pasangan usia subur tidak ingin anak lagi (unmeet ned) tidak terlayani KB			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.451.740.600	
		Meningkatnya birokrasi yang kafabel					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cakupan administrasi perkantoran yang ditata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.674.798.500	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
				Cakupan kualitas dan kuantitas layanan pendaftaran penduduk			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.272.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
				Cakupan kualitas dan kuantitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
				Persentase pendayagunaan data kependudukan untuk semua keperluan			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	45.000.000	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
				Persentase Ranperda yang dibahas sehingga menjadi Perda dan terlaksananya Koordinasi, Konsultasi dan pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD			
					Sekretariat DPRD	92.978.787.921	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan administrasi kantor yang ditata pada Baperlitbang			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	18.567.838.650	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
				Persentase Capaian Program kinerja daerah terhadap perencanaan Pembangunan Daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.112.000.000	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan bidang PPM, bidang Perekonomian dan SDA dan bidang infrastruktur dan kewilayahan			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.400.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan administrasi kantor yang ditata pada Badan Keuangan Daerah			
					Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	17.617.019.535	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
				Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah			
					Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	503.020.924.821	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
				Tertib Administrasi Barang Milik Daerah			
					Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.983.912.775	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan administrasi kantor yang ditata Badan Kepegawaian			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	31.500.222.000	
				Cakupan administrasi kantor yang ditata			
					Kecamatan X koto	6.065.584.350	
					Kecamatan Batipuh	5.002.735.569	
					Kecamatan Batipuh Selatan	90.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari			
					Kecamatan X koto	40.938.900	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Persentase ketentraman dan ketertiban umum			
					Kecamatan X koto	36.300.000	
					Kecamatan Batipuh	30.000.000	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum			
					Kecamatan X koto	221.438.226	
					Kecamatan Batipuh	275.490.636	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
				Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa			
					Kecamatan X koto	313.500.000	
					Kecamatan Batipuh	310.500.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan administrasi kantor yang ditata			
					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12.000.000	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
				Persentase kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan yang berlaku			
					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.698.053.200	
			Meningkatnya Daya Saing UMKM, Koperasi dan ekonomi kreatif				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan administrasi kantor yang ditata			
					Sekretariat Daerah	66.917.935.574	
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan administrasi kantor yang ditata			
					Dinas Kesehatan	137.544.477.356	
			Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat				
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat			
					Sekretariat Daerah	3.982.981.382	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cakupan Data Evaluasi tentang Kebijakan Perekonomian Daerah, Administrasi Pembangunan dan prinsip pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku			
					Sekretariat Daerah	3.808.600.862	
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	200.000.000	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					Dinas Kesehatan	16.000.000	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				

					Dinas Kesehatan	32.255.750	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	124.998.250	
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	214.177.500	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				

					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	155.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					Dinas Komunikasi dan Informatika	5.600.000	
			Lancarnya pelaksanaan tugas				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.976.625.341	
				Lancarnya Pelaksanaan Tugas			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	70.000.000	
				Presentase unit kerja yang terlayani administrasi perkantoran			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	91.346.659	
				Terlaksananya kegiatan diklat ASN			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.000.000	
				Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	183.000.000	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
				Jumlah perpustakaan yang memenuhi standar nasional			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	157.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Presentase unit kerja yang terlayani administrasi perkantoran			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
				OPD/Nagari yang menerapkan arsip secara baku			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	74.000.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
				Terpeliharanya arsip/dokum daerah			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					Sekretariat DPRD	29.403.633.000	
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan	30.000.000	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pengembangan		
					Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.030.916.900	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				

					Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.796.905.685	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				

					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	709.942.450	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					Inspektorat	10.000.000	

BAB IV**PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Perubahan Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan daerah dipergunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah, yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial serta meningkatkan daya saing daerah.

Perubahan Plafon Anggaran menurut urusan pemerintah daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada table 4.1.

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	424.780.319.860	447.908.750.025	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	424.780.319.860	447.908.750.025	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	424.780.319.860	447.908.750.025	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	339.408.735.159	358.357.563.324	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.705.000	107.138.340	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.470.000	55.702.315	
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000	17.693.645	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.235.000	33.742.380	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	338.004.064.159	357.170.931.725	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	337.938.264.159	357.109.791.105	
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	43.800.000	39.950.820	
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22.000.000	21.189.800	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	213.269.600	195.738.280	
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	213.269.600	195.738.280	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.500.000	7.500.000	
1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.500.000	7.500.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.554.200	186.612.779	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.996.500	9.996.500	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.311.700	55.181.510	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.999.900	28.697.080	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	15.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.246.100	10.246.100	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.000.000	67.491.589	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.213.000	348.213.000	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	999.000	999.000	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000	184.000.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.214.000	163.214.000	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.429.200	341.429.200	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	261.265.200	260.265.200	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	16.000.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.164.000	65.164.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	85.268.591.701	89.448.193.701	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	53.861.480.701	55.112.480.701	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	199.780.000	199.780.000	
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	325.683.600	325.683.600	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.912.330.501	2.081.453.467	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4.481.190.600	4.501.190.600	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	347.286.000	347.286.000	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	90.000.000	90.000.000	
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	14.890.000	96.890.000	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	2.468.810.000	3.382.810.000	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.029.340.000	1.029.340.000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	47.690.000	47.690.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	59.420.000	59.420.000	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.686.920.000	6.686.920.000	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	438.480.000	478.480.000	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	18.460.000	18.460.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	33.682.700.000	33.682.700.000	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	58.500.000	58.500.000	
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	0	2.025.877.034	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	22.451.118.000	24.248.720.000	
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	568.631.600	568.631.600	
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	552.448.000	552.448.000	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	1.240.994.398	1.240.994.398	
1.01.02.2.02.08	Pembangunan Asrama Sekolah	2.298.460.000	2.298.460.000	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	599.674.000	1.925.244.000	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0	103.132.000	
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	47.626.000	47.626.000	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	331.875.001	331.875.001	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	107.779.001	107.779.001	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	1.752.140.000	2.056.040.000	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	75.000.000	140.000.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	344.720.000	344.720.000	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	60.410.000	60.410.000	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	1.991.590.000	1.991.590.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Pertama			
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	477.270.000	477.270.000	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	10.000.000	10.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	11.973.000.000	11.973.000.000	
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.500.000	19.500.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.530.483.000	8.250.083.000	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	123.630.140	123.630.140	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	633.638.540	633.638.540	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	331.399.320	407.399.320	
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	80.000.000	80.000.000	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	55.000.000	153.000.000	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	90.000.000	90.000.000	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.348.570.000	1.348.570.000	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	301.135.000	321.135.000	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	55.710.000	55.710.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.511.400.000	5.037.000.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.425.510.000	1.836.910.000	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	38.450.000	38.450.000	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	24.010.000	24.010.000	
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	199.450.000	199.450.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.000.000	90.000.000	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10.000.000	10.000.000	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.053.600.000	1.475.000.000	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	102.993.000	102.993.000	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	65.842.000	65.842.000	
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	65.842.000	65.842.000	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	37.151.000	37.151.000	
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	37.151.000	37.151.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	276.682.136.605	293.481.871.315	
1.02.0.00.0.00.00.0000	Dinas Kesehatan	150.829.807.873	157.048.530.406	
1.02.0.00.0.00.00.0000	Dinas Kesehatan	114.901.421.250	119.676.606.670	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.765.904.032	65.015.137.092	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131.648.000	89.648.000	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	25.000.000	25.000.000	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	91.648.000	49.648.000	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.521.667.733	62.088.853.114	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.473.614.033	62.046.799.414	
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	34.257.700	28.257.700	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.796.000	13.796.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.900.000	16.400.000	
1.02.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	29.900.000	16.400.000	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.458.088.000	1.417.088.000	
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	46.640.000	25.640.000	
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.411.448.000	1.391.448.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	284.211.000	200.461.000	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.622.200	53.122.200	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.000.000	36.000.000	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.338.800	20.338.800	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.250.000	75.000.000	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.170.502.321	37.850.000	
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.540.502.321	22.800.000	
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	15.000.000	15.000.000	
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	50.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.713.820	372.663.820	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	107.981.420	124.931.420	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.160.000	184.160.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.572.400	63.572.400	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	794.173.158	792.173.158	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	315.000.000	313.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Dinas Jabatan			
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.152.000	37.152.000	
1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	5.000.000	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	20.000.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	150.000.000	
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	248.361.158	248.361.158	
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.660.000	18.660.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	49.789.310.218	50.068.760.257	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.797.234.828	9.897.234.828	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	1.000.000	1.000.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.375.832.888	2.475.832.888	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	2.365.000.000	2.365.000.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.860.187.940	4.860.187.940	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	66.000.000	66.000.000	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	129.214.000	129.214.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.940.819.640	40.120.269.679	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.452.798.240	2.452.798.240	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	406.035.000	406.035.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	423.750.000	423.750.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	346.464.000	346.464.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	300.000.000	300.000.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	300.000.000	300.000.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	300.000.000	300.000.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	373.700.000	373.700.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	338.825.000	338.825.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	359.462.500	359.462.500	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	290.000.000	290.000.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	300.000.000	300.000.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.224.991.500	2.224.991.500	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	30.000.000	30.000.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	843.603.400	843.603.400	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	15.000.000	15.000.000	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	60.000.000	60.000.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	307.160.000	307.160.000	
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	80.000.000	80.000.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	27.279.500	27.279.500	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	260.000.000	260.000.000	
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	60.000.000	60.000.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	278.442.800	457.892.839	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	29.000.000.000	29.000.000.000	
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	50.000.000	50.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	55.000.000	55.000.000	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	193.991.678	193.991.678	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	204.316.022	204.316.022	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	60.000.000	60.000.000	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	47.255.750	47.255.750	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	32.255.750	32.255.750	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	15.000.000	15.000.000	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.000.000	4.000.000	
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	4.000.000	4.000.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	7.000.000	7.000.000	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	7.000.000	7.000.000	
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	7.000.000	7.000.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	603.904.000	603.904.000	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	80.985.000	80.985.000	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	80.985.000	80.985.000	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan	295.113.000	295.113.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	295.113.000	295.113.000	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	15.000.000	15.000.000	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	15.000.000	15.000.000	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	212.806.000	212.806.000	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	212.806.000	212.806.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	735.303.000	3.981.805.321	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	633.049.000	3.879.551.321	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	633.049.000	3.879.551.321	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102.254.000	102.254.000	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	102.254.000	102.254.000	
1.02.0.00.0.00.02.0001	UPT Puskesmas X Koto I	1.424.083.488	1.446.210.559	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	674.709.200	696.836.271	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	674.709.200	696.836.271	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	674.709.200	696.836.271	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	749.374.288	749.374.288	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	749.374.288	749.374.288	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	749.374.288	749.374.288	
1.02.0.00.0.00.02.0002	UPT Puskesmas X Koto II	1.529.116.789	1.589.227.534	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	801.895.427	851.597.247	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	801.895.427	851.597.247	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	801.895.427	851.597.247	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	727.221.362	737.630.287	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	727.221.362	737.630.287	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	727.221.362	737.630.287	
1.02.0.00.0.00.02.0003	UPT Puskesmas Singgalang	1.030.421.513	1.030.456.480	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	471.286.244	471.321.211	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	471.286.244	471.321.211	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	471.286.244	471.321.211	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	559.135.269	559.135.269	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	559.135.269	559.135.269	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	559.135.269	559.135.269	
1.02.0.00.0.00.02.0004	UPT Puskesmas Batipuh I	1.804.426.877	1.906.281.127	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	995.371.045	1.088.898.155	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	995.371.045	1.088.898.155	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	995.371.045	1.088.898.155	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	809.055.832	817.382.972	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	809.055.832	817.382.972	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	809.055.832	817.382.972	
1.02.0.00.0.00.02.0005	UPT Puskesmas Batipuh II	1.258.878.601	1.276.783.068	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	688.573.369	693.987.126	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	688.573.369	693.987.126	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	688.573.369	693.987.126	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	570.305.232	582.795.942	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	570.305.232	582.795.942	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	570.305.232	582.795.942	
1.02.0.00.0.00.02.0006	UPT Puskesmas Batipuh Selatan	1.482.105.883	1.482.683.631	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	778.871.500	779.449.248	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	778.871.500	779.449.248	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	778.871.500	779.449.248	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	703.234.383	703.234.383	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	703.234.383	703.234.383	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	703.234.383	703.234.383	
1.02.0.00.0.00.02.0007	UPT Puskesmas Rambatan I	1.583.428.688	1.706.927.475	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	766.800.000	873.644.507	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	766.800.000	873.644.507	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	766.800.000	873.644.507	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	816.628.688	833.282.968	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	816.628.688	833.282.968	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	816.628.688	833.282.968	
1.02.0.00.0.00.02.0008	UPT Puskesmas Rambatan II	1.520.104.802	1.727.163.967	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	710.008.570	917.067.735	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	710.008.570	917.067.735	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	710.008.570	917.067.735	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	810.096.232	810.096.232	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	810.096.232	810.096.232	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	810.096.232	810.096.232	
1.02.0.00.0.00.02.0009	UPT Puskesmas Pariangan	1.797.245.000	1.933.440.907	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	840.688.056	989.374.673	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	840.688.056	989.374.673	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	840.688.056	989.374.673	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	956.556.944	944.066.234	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	956.556.944	944.066.234	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	956.556.944	944.066.234	
1.02.0.00.0.00.02.0010	UPT Puskesmas Lima Kaum I	2.279.062.732	2.317.035.606	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.186.462.543	1.224.435.417	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.186.462.543	1.224.435.417	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.186.462.543	1.224.435.417	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.092.600.189	1.092.600.189	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.092.600.189	1.092.600.189	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.092.600.189	1.092.600.189	
1.02.0.00.0.00.02.0011	UPT Puskesmas Lima Kaum II	960.196.832	960.306.427	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	400.950.000	401.059.595	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	400.950.000	401.059.595	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	400.950.000	401.059.595	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	559.246.832	559.246.832	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	559.246.832	559.246.832	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	559.246.832	559.246.832	
1.02.0.00.0.00.02.0012	UPT Puskesmas Pagaruyung	894.101.321	894.889.269	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	419.856.517	420.644.465	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	419.856.517	420.644.465	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	419.856.517	420.644.465	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	474.244.804	474.244.804	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	474.244.804	474.244.804	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	474.244.804	474.244.804	
1.02.0.00.0.00.02.0013	UPT Puskesmas Tanjung Emas	2.032.396.577	2.128.710.168	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.187.946.945	1.284.260.536	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.187.946.945	1.284.260.536	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.187.946.945	1.284.260.536	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	844.449.632	844.449.632	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	844.449.632	844.449.632	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	844.449.632	844.449.632	
1.02.0.00.0.00.02.0014	UPT Puskesmas Padang Ganting	1.318.495.815	1.394.456.996	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	586.594.127	662.555.308	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	586.594.127	662.555.308	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	586.594.127	662.555.308	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	731.901.688	731.901.688	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	731.901.688	731.901.688	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	731.901.688	731.901.688	
1.02.0.00.0.00.02.0015	UPT Puskesmas Lintau Buo Utara I	1.930.322.590	2.017.000.873	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.016.153.558	1.088.240.766	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.016.153.558	1.088.240.766	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.016.153.558	1.088.240.766	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	914.169.032	928.760.107	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	914.169.032	928.760.107	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	914.169.032	928.760.107	
1.02.0.00.0.00.02.0016	UPT Puskesmas Lintau Buo	2.087.135.394	2.291.219.629	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.094.569.362	1.298.653.597	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.094.569.362	1.298.653.597	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.094.569.362	1.298.653.597	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	992.566.032	992.566.032	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	992.566.032	992.566.032	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	992.566.032	992.566.032	
1.02.0.00.0.00.02.0017	UPT Puskesmas Lintau Buo Utara II	1.867.531.479	1.917.635.514	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	861.823.627	928.581.942	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	861.823.627	928.581.942	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	861.823.627	928.581.942	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.005.707.852	989.053.572	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.005.707.852	989.053.572	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.005.707.852	989.053.572	
1.02.0.00.0.00.02.0018	UPT Puskesmas Sungayang	1.729.743.688	1.740.579.611	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	918.000.000	928.835.923	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	918.000.000	928.835.923	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	918.000.000	928.835.923	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	811.743.688	811.743.688	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	811.743.688	811.743.688	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	811.743.688	811.743.688	
1.02.0.00.0.00.02.0019	UPT Puskesmas Sungai Tarab I	1.530.696.691	1.590.348.116	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	684.052.059	752.030.624	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	684.052.059	752.030.624	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	684.052.059	752.030.624	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	846.644.632	838.317.492	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	846.644.632	838.317.492	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	846.644.632	838.317.492	
1.02.0.00.0.00.02.0020	UPT Puskesmas Sungai Tarab II	1.547.868.833	1.550.443.311	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	812.443.489	815.017.967	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	812.443.489	815.017.967	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	812.443.489	815.017.967	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	735.425.344	735.425.344	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	735.425.344	735.425.344	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	735.425.344	735.425.344	
1.02.0.00.0.00.02.0021	UPT Puskesmas Gurun	783.677.230	784.352.583	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	377.443.299	378.118.652	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	377.443.299	378.118.652	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	377.443.299	378.118.652	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	406.233.931	406.233.931	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	406.233.931	406.233.931	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	406.233.931	406.233.931	
1.02.0.00.0.00.02.0022	UPT Puskesmas Salimpaung	2.184.343.212	2.186.596.297	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.253.685.524	1.255.938.609	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.253.685.524	1.255.938.609	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.253.685.524	1.255.938.609	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	930.657.688	930.657.688	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	930.657.688	930.657.688	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	930.657.688	930.657.688	
1.02.0.00.0.00.02.0023	UPT Puskesmas Tanjung Baru	1.353.002.588	1.499.174.588	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	682.800.000	828.972.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	682.800.000	828.972.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	682.800.000	828.972.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	670.202.588	670.202.588	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	670.202.588	670.202.588	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	670.202.588	670.202.588	
1.02.0.00.0.00.03.0000	Rumah Sakit Umum Daerah	125.852.328.732	136.433.340.909	
1.02.0.00.0.00.03.0000	Rumah Sakit Umum Daerah	125.852.328.732	136.433.340.909	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	89.918.262.620	100.499.274.797	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.918.262.620	31.576.546.326	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.918.262.620	31.576.546.326	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	56.000.000.000	68.922.728.471	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	56.000.000.000	68.922.728.471	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	35.934.066.112	35.934.066.112	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	35.934.066.112	35.934.066.112	
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	35.934.066.112	18.482.000.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	17.452.066.112	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	82.562.138.838	84.116.120.520	
1.03.2.10.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	82.562.138.838	84.116.120.520	
1.03.2.10.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	82.562.138.838	84.116.120.520	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.743.558.343	7.459.666.756	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	5.299.701	
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.500.000	3.021.500	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000	2.278.201	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.933.514.894	6.510.331.616	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.929.764.894	6.506.677.616	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.750.000	3.654.000	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000	11.149.740	
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	11.149.740	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.970.000	80.426.000	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	20.000.000	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000	9.000.000	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	7.000.000	
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	5.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.970.000	34.426.000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.157.600	243.157.600	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	150.000.000	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.657.600	92.657.600	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	925.915.849	609.302.099	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000.000	317.195.699	
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	489.515.849	215.644.000	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	39.898.000	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.400.000	36.564.400	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.076.748.299	5.066.205.599	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.600.298.000	1.584.755.300	
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.087.500.000	1.087.500.000	
1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	190.000.000	190.000.000	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	150.000.000	150.000.000	
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	172.798.000	157.255.300	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.476.450.299	3.481.450.299	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.312.682.995	2.282.682.995	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.163.767.304	1.198.767.304	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.150.000.000	1.925.000.000	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.150.000.000	1.925.000.000	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.150.000.000	1.925.000.000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.595.000.000	1.586.031.100	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.595.000.000	1.586.031.100	
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	1.395.000.000	1.389.321.100	
1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	200.000.000	196.710.000	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	900.000.000	958.679.500	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	900.000.000	958.679.500	
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	100.000.000	95.409.500	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	250.000.000	250.000.000	
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	550.000.000	613.270.000	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.050.000.000	593.545.740	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.050.000.000	593.545.740	
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.050.000.000	593.545.740	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	570.000.000	3.430.000.000	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	570.000.000	3.430.000.000	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	100.000.000	100.000.000	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	470.000.000	3.330.000.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	61.377.100.836	62.638.353.885	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	61.377.100.836	62.638.353.885	
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	6.189.834.500	3.989.834.500	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	150.000.000	150.000.000	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	1.002.246.000	1.002.246.000	
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	1.350.000.000	1.350.000.000	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	48.960.020.336	49.350.020.336	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	0	1.277.381.200	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.300.000.000	4.093.871.849	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	275.000.000	275.000.000	
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	1.000.000.000	1.000.000.000	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	150.000.000	150.000.000	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	56.000.000	49.900.440	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	56.000.000	49.900.440	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	30.000.000	24.876.940	
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	26.000.000	25.023.500	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.043.731.360	408.737.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	848.650.000	247.232.820	
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	848.650.000	247.232.820	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	120.081.360	103.392.680	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	95.081.360	82.527.180	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	25.000.000	20.865.500	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	58.112.000	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	75.000.000	58.112.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	876.447.000	753.922.442	
1.04.2.11.0.00.04.0000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	876.447.000	753.922.442	
1.04.2.11.0.00.04.0000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	876.447.000	753.922.442	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	122.447.000	122.447.000	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	12.447.000	12.447.000	
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	8.000.000	8.000.000	
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	4.447.000	4.447.000	
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	10.000.000	10.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	70.000.000	70.000.000	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	70.000.000	70.000.000	
1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	
1.04.02.2.04.01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	
1.04.02.2.04.02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	20.000.000	20.000.000	
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	20.000.000	20.000.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	20.000.000	20.000.000	
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	20.000.000	20.000.000	
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	20.000.000	20.000.000	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	647.000.000	524.475.442	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	647.000.000	524.475.442	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	647.000.000	524.475.442	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	87.000.000	87.000.000	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	87.000.000	87.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	87.000.000	87.000.000	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.823.238.266	11.458.196.901	
1.05.0.00.0.00.05.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.417.391.597	7.948.184.643	
1.05.0.00.0.00.05.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.417.391.597	7.948.184.643	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.335.059.597	4.970.743.943	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.998.250	14.998.250	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.998.250	4.998.250	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.820.121.100	4.357.974.146	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.815.122.850	4.352.975.896	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.998.250	4.998.250	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	25.000.000	
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	25.000.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.865.197	145.805.197	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.999.100	5.999.100	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.452.500	21.452.500	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.875	12.939.875	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	7.000.000	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.819.500	10.819.500	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.594.222	87.594.222	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.497.600	54.497.600	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	50.000.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.497.600	3.497.600	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322.577.450	372.468.750	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	314.577.450	364.468.750	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	8.000.000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.214.564.400	1.227.564.400	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	144.500.000	144.500.000	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	95.000.000	95.000.000	
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	49.500.000	49.500.000	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	989.059.400	1.022.059.400	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	989.059.400	1.022.059.400	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	81.005.000	61.005.000	
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	81.005.000	61.005.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	1.867.767.600	1.749.876.300	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	KEBAKARAN			
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.817.721.600	1.734.830.300	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.320.000	10.320.000	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.807.401.600	1.724.510.300	
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	40.000.000	5.000.000	
1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	40.000.000	5.000.000	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	10.046.000	10.046.000	
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	10.046.000	10.046.000	
1.05.0.00.0.00.07.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.405.846.669	3.510.012.258	
1.05.0.00.0.00.07.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.405.846.669	3.510.012.258	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.633.630.528	2.768.296.117	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	7.728.500	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000	3.728.500	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.164.130.528	2.295.194.547	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.158.130.528	2.289.194.547	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000	6.000.000	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	5.000.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.000.000	119.373.070	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000	17.071.500	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	6.301.570	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	7.000.000	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000	9.000.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	75.000.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	18.500.000	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	18.500.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.500.000	59.000.000	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000	31.500.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.000.000	26.000.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252.000.000	263.500.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.000.000	239.500.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000	11.000.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.000.000	13.000.000	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	772.216.141	741.716.141	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	7.000.000	7.000.000	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	7.000.000	7.000.000	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	755.216.141	733.216.141	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	29.500.000	29.500.000	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	474.000.000	465.900.000	
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	106.216.141	106.216.141	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	83.000.000	78.500.000	
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	40.000.000	33.100.000	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10.000.000	1.500.000	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000	1.500.000	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7.679.736.582	33.479.207.521	
1.06.2.08.0.00.08.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.679.736.582	33.479.207.521	
1.06.2.08.0.00.08.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.679.736.582	33.479.207.521	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.392.454.112	4.084.801.444	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	16.463.000	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	3.143.000	
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000	8.320.000	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.782.261.096	3.579.349.303	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.777.261.096	3.576.165.303	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	3.184.000	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000	15.936.750	
1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	15.936.750	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.193.016	93.052.391	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	17.539.800	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	11.200.100	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000	
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	10.000.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.193.016	44.312.491	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.000.000	79.000.000	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	50.000.000	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.000.000	24.000.000	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.000.000	301.000.000	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	185.000.000	185.000.000	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	20.000.000	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	111.000.000	96.000.000	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	249.340.211	239.647.311	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	249.340.211	239.647.311	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan	25.000.000	23.529.100	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kabupaten/Kota			
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	149.000.000	147.200.000	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	66.640.211	63.718.211	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	8.700.000	5.200.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.244.704.819	28.235.025.699	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.212.204.819	2.391.504.819	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	750.000.000	750.000.000	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	6.110.000	1.185.410.000	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	456.094.819	456.094.819	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	32.500.000	25.843.520.880	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	23.500.000	23.500.000	
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	5.000.000	5.000.000	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	4.000.000	25.815.020.880	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.629.437.440	756.356.967	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	450.137.440	756.356.967	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	21.000.000	18.769.200	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	339.217.840	556.840.240	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	89.919.600	180.747.527	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	128.800.000	128.800.000	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	128.800.000	128.800.000	
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	128.800.000	128.800.000	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	35.000.000	34.576.100	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	35.000.000	34.576.100	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	35.000.000	34.576.100	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	444.276.800	442.276.800	
2.18.2.07.3.29.09.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	444.276.800	442.276.800	
2.18.2.07.3.29.09.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	444.276.800	442.276.800	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	390.900.000	388.900.000	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	389.900.000	388.900.000	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	388.900.000	388.900.000	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	51.376.800	51.376.800	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000	1.000.000	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	1.000.000	1.000.000	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	50.376.800	50.376.800	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	50.376.800	50.376.800	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.000.000	2.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000	1.000.000	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	1.000.000	1.000.000	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000	1.000.000	
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	1.000.000	1.000.000	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	924.411.400	1.224.551.342	
1.06.2.08.0.00.08.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	924.411.400	1.224.551.342	
1.06.2.08.0.00.08.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	924.411.400	1.224.551.342	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	769.900.000	860.178.700	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	32.078.700	
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	5.987.800	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	30.000.000	26.090.900	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	265.000.000	265.000.000	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	265.000.000	265.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	464.900.000	563.100.000	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	449.900.000	549.900.000	
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	13.200.000	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	23.150.000	19.985.000	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	16.150.000	14.485.000	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	6.150.000	6.150.000	
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	8.335.000	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	7.000.000	5.500.000	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	7.000.000	5.500.000	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	22.430.200	19.530.640	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.430.200	19.530.640	
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	22.430.200	19.530.640	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	46.804.500	42.256.800	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	46.804.500	42.256.800	
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.804.500	42.256.800	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	62.126.700	282.600.202	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	24.126.700	21.224.800	
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24.126.700	21.224.800	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.000.000	261.375.402	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.000.000	261.375.402	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.751.572.607	4.424.358.174	
2.09.3.25.0.00.10.0000	Dinas Pangan dan Perikanan	3.751.572.607	4.424.358.174	
2.09.3.25.0.00.10.0000	Dinas Pangan dan Perikanan	3.751.572.607	4.424.358.174	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.483.222.607	3.536.431.694	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.277.735	62.053.912	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.546.840	31.437.916	
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.730.895	30.615.996	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.986.877.657	3.028.509.970	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.956.230.976	2.997.901.023	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.646.681	30.608.947	
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	3.400.000	
2.09.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	3.400.000	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.636.015	126.586.612	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	907.400	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.836.015	13.716.289	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.500.000	11.529.063	
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	1.500.000	
2.09.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	5.200.000	5.200.000	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.100.000	93.733.860	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.500.000	94.500.000	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.000.000	60.000.000	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.500.000	33.500.000	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.931.200	221.381.200	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.000.000	189.000.000	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	2.000.000	
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.931.200	30.381.200	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	6.000.000	680.292.500	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.000.000	680.292.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	6.000.000	680.292.500	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	183.000.000	134.156.480	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	26.000.000	22.268.790	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	5.000.000	3.476.250	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	7.000.000	6.862.440	
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	14.000.000	11.930.100	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	130.000.000	91.083.040	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	130.000.000	91.083.040	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	27.000.000	20.804.650	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	27.000.000	20.804.650	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	67.350.000	63.683.900	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	67.350.000	63.683.900	
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	67.350.000	63.683.900	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	12.000.000	9.793.600	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000	9.793.600	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	12.000.000	9.793.600	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Daerah Kabupaten/Kota			
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	483.444.200	413.303.986	
1.03.2.10.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	483.444.200	413.303.986	
1.03.2.10.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	483.444.200	413.303.986	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	40.000.000	38.194.000	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	38.194.000	
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	19.057.500	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	19.136.500	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	15.000.000	13.179.500	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	13.179.500	
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	15.000.000	13.179.500	
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	307.943.200	273.483.986	
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	307.943.200	273.483.986	
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	307.943.200	273.483.986	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	120.501.000	88.446.500	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	120.501.000	88.446.500	
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	120.501.000	88.446.500	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10.992.547.157	10.878.103.857	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.04.2.11.0.00.04.0000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	10.992.547.157	10.878.103.857	
1.04.2.11.0.00.04.0000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	10.992.547.157	10.878.103.857	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.209.529.892	4.095.086.592	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.710.603.192	3.596.159.892	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.700.603.192	3.586.159.892	
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	10.000.000	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.982.300	114.982.300	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	10.000.000	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000	
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	15.000.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.982.300	64.982.300	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.054.400	92.054.400	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000	45.000.000	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.054.400	42.054.400	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.890.000	271.890.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.000.000	225.000.000	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.890.000	36.890.000	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000	200.000.000	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	200.000.000	200.000.000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	35.000.000	35.000.000	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	35.000.000	35.000.000	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	25.000.000	25.000.000	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10.000.000	10.000.000	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	497.174.300	497.174.300	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	497.174.300	497.174.300	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	497.174.300	497.174.300	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	21.177.000	21.177.000	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	10.000.000	10.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	10.000.000	10.000.000	
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.177.000	11.177.000	
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	11.177.000	11.177.000	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	35.865.000	35.865.000	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.865.000	35.865.000	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	25.000.000	25.000.000	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.865.000	10.865.000	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	14.000.000	14.000.000	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.000.000	14.000.000	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	14.000.000	14.000.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.979.800.965	5.979.800.965	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	5.979.800.965	5.979.800.965	
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.588.846.965	3.588.846.965	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	10.000.000	10.000.000	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.370.954.000	2.370.954.000	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.984.882.795	4.156.134.656	
2.12.0.00.0.00.11.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.984.882.795	4.156.134.656	
2.12.0.00.0.00.11.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.984.882.795	4.156.134.656	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.414.382.795	3.561.977.954	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.528.664	24.414.764	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.999.900	5.999.900	
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.557.264	9.443.364	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.971.500	8.971.500	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.415.226.452	2.365.809.091	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.406.631.452	2.358.214.091	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.595.000	7.595.000	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	3.000.000	
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	3.000.000	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.450.179	170.426.599	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.996.000	1.996.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.393.994	3.393.994	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000	40.000.000	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	21.525.851	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.194.000	5.044.000	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	10.000.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.866.185	88.466.754	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	328.500.000	548.500.000	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	328.500.000	548.500.000	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.677.500	210.677.500	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.620.000	3.620.000	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.557.500	203.557.500	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.500.000	3.500.000	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.000.000	239.150.000	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.000.000	119.150.000	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	20.000.000	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	395.500.000	419.156.702	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	165.000.000	165.510.202	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	165.000.000	165.510.202	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	230.500.000	253.646.500	
2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait	213.000.000	238.146.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Pendaftaran Penduduk			
2.12.02.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	17.500.000	15.500.000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	145.000.000	145.000.000	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	145.000.000	145.000.000	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	145.000.000	145.000.000	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	20.000.000	20.000.000	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	10.000.000	10.000.000	
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10.000.000	10.000.000	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10.000.000	10.000.000	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10.000.000	10.000.000	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	10.000.000	10.000.000	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	10.000.000	10.000.000	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	10.000.000	10.000.000	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.529.072.286	12.254.254.242	
2.13.2.14.0.00.12.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.529.072.286	12.254.254.242	
2.13.2.14.0.00.12.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.529.072.286	12.254.254.242	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.756.032.081	3.698.144.659	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.770.000	15.010.250	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.020.000	3.880.350	
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.875.000	4.729.500	
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.875.000	6.400.400	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.209.444.981	3.174.309.539	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.206.070.981	3.171.138.339	
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.374.000	3.171.200	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.592.000	88.757.770	
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	3.000.000	
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.049.500	17.361.390	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.749.000	8.134.300	
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.600.000	
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.820.500	6.820.500	
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.373.000	49.841.580	
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.000.000	35.842.000	
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.000.000	35.842.000	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.477.800	123.477.800	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	900.000	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000	45.000.000	
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.577.800	77.577.800	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.747.300	260.747.300	
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	233.247.300	233.247.300	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.500.000	17.500.000	
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	15.000.000	9.829.900	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	15.000.000	9.829.900	
2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	15.000.000	9.829.900	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	15.000.000	10.326.400	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	15.000.000	10.326.400	
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	15.000.000	10.326.400	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	5.947.252.705	5.327.244.943	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.947.252.705	5.327.244.943	
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	16.274.800	11.820.080	
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	28.193.700	22.642.590	
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	25.000.000	20.000.000	
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	22.582.500	14.920.550	
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	19.722.505	14.568.874	
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	4.322.631.200	5.195.669.269	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	20.000.000	14.646.000	
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	20.000.000	19.880.000	
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	20.000.000	13.097.580	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.795.787.500	3.208.708.340	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta	1.795.787.500	3.208.708.340	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	15.000.000	14.319.900	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	490.000.000	1.942.848.000	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	40.390.000	36.012.760	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	20.068.700	19.492.340	
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100.164.400	75.870.940	
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.130.164.400	1.120.164.400	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.711.755.365	7.840.296.714	
2.13.2.14.0.00.12.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.711.755.365	7.840.296.714	
2.13.2.14.0.00.12.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.711.755.365	7.840.296.714	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	64.649.900	55.464.140	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	64.649.900	55.464.140	
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000	40.814.240	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	14.649.900	14.649.900	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.847.940.200	5.394.089.515	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.211.300.000	1.607.449.315	
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	148.200.000	148.200.000	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.063.100.000	1.063.100.000	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	0	396.149.315	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.234.818.200	1.384.818.200	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.234.818.200	1.384.818.200	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.124.322.000	2.124.322.000	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25.200.000	25.200.000	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.061.312.000	1.061.312.000	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.037.810.000	1.037.810.000	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	277.500.000	277.500.000	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	277.500.000	277.500.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.799.165.265	2.390.743.059	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	75.000.000	71.984.070	
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25.000.000	22.691.070	
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50.000.000	49.293.000	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.724.165.265	2.318.758.989	
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10.895.400	9.827.850	
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2.713.269.865	2.308.931.139	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	15.248.966.718	18.663.596.020	
2.15.0.00.0.00.13.0000	Dinas Perhubungan	15.248.966.718	18.663.596.020	
2.15.0.00.0.00.13.0000	Dinas Perhubungan	15.248.966.718	18.663.596.020	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.869.792.500	4.693.732.552	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	10.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.029.463.700	4.009.513.270	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.019.463.700	3.999.513.270	
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	10.000.000	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.500.000	90.385.000	
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40.000.000	40.000.000	
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	57.500.000	50.385.000	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.500.000	101.505.482	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000	4.500.000	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.000.000	18.560.100	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.500.000	9.569.900	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.500.000	11.500.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	51.375.482	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.000.000	82.000.000	
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	40.000.000	22.000.000	
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	10.000.000	
2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.164.400	136.164.400	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.000.000	43.000.000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000	60.000.000	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.164.400	33.164.400	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	264.164.400	259.164.400	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.000.000	215.000.000	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.000.000	14.000.000	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.164.400	30.164.400	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	10.379.174.218	13.969.863.468	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	320.000.000	282.972.935	
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	
2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	20.000.000	9.418.600	
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	250.000.000	223.554.335	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9.266.293.218	12.919.151.893	
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	200.000.000	37.212.900	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	378.000.000	492.248.700	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	8.688.293.218	12.389.690.293	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	80.000.000	71.855.800	
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	80.000.000	71.855.800	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	345.366.000	355.125.300	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	345.366.000	355.125.300	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	321.000.000	314.144.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	256.000.000	249.144.500	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	65.000.000	65.000.000	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	21.000.000	7.909.500	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	21.000.000	7.909.500	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.515.000	18.703.540	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	25.515.000	18.703.540	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.288.518.288	5.969.279.177	
2.16.2.20.2.21.14.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.288.518.288	5.969.279.177	
2.16.2.20.2.21.14.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.288.518.288	5.969.279.177	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.308.533.286	3.404.593.216	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	10.925.965	
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	4.925.965	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	6.000.000	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.841.587.930	2.712.884.305	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.835.427.930	2.706.724.305	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.160.000	6.160.000	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.240.000	9.240.000	
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.240.000	9.240.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.203.756	309.391.346	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.464.000	2.464.000	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	18.970.000	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.776.000	6.776.000	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.163.840	115.163.840	
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	10.000.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000	153.367.590	
2.16.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.799.916	2.649.916	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000	5.500.000	
2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	5.500.000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.341.600	221.491.600	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	924.000	924.000	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.760.000	108.910.000	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.657.600	111.657.600	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.160.000	135.160.000	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.760.000	133.760.000	
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	840.000	840.000	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	560.000	560.000	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.104.285.829	1.686.602.103	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.104.285.829	1.686.602.103	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	13.000.000	13.000.000	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	440.822.400	551.777.300	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	38.290.000	34.675.285	
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	54.640.000	334.046.289	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	557.533.429	753.103.229	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	875.699.173	878.083.858	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	875.699.173	878.083.858	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	236.897.893	249.282.578	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	638.801.280	628.801.280	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	10.579.244.754	5.704.885.990	
2.17.3.30.3.31.15.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	10.579.244.754	5.704.885.990	
2.17.3.30.3.31.15.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	10.579.244.754	5.704.885.990	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.467.231.989	4.361.711.132	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.191.144	37.191.144	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.195.000	3.195.000	
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	28.992.775	28.992.775	
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.003.369	5.003.369	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.023.610.661	3.932.715.148	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.018.110.792	3.927.831.479	
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.499.869	4.883.669	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	7.830.000	
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	7.830.000	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.091.609	102.636.265	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	8.000.000	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.834.450	15.338.415	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000	6.601.046	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000	9.000.000	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.757.159	60.696.804	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.370.275	106.370.275	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.998.000	1.998.000	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.074.775	100.074.775	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.297.500	4.297.500	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.968.300	174.968.300	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.253.300	129.253.300	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.715.000	5.715.000	
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	40.000.000	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	10.000.000	9.750.000	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	9.750.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	9.750.000	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	140.125.000	140.125.000	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	140.125.000	140.125.000	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	140.125.000	140.125.000	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	30.000.000	30.000.000	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	30.000.000	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	30.000.000	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	462.199.125	422.416.658	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	462.199.125	422.416.658	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	181.954.125	142.171.658	
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	280.245.000	280.245.000	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	5.469.688.640	740.883.200	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	5.469.688.640	740.883.200	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	5.469.688.640	740.883.200	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.624.991.829	5.618.539.932	
2.18.2.07.3.29.09.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	5.624.991.829	5.618.539.932	
2.18.2.07.3.29.09.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	5.624.991.829	5.618.539.932	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.658.860.409	4.624.428.512	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.000.000	18.000.000	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	10.000.000	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.125.545.289	4.111.871.692	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.120.545.289	4.106.871.692	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.500.000	4.500.000	
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.500.000	4.500.000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.750.000	75.149.700	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.750.000	3.750.000	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	10.000.000	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	11.399.700	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	4.000.000	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	5.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.000.000	41.000.000	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.197.911	189.439.911	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	1.000.000	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000	70.000.000	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	121.197.911	118.439.911	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.467.209	225.467.209	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.090.409	173.090.409	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	2.000.000	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.376.800	50.376.800	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	6.650.000	4.990.000	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	6.650.000	4.990.000	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	6.650.000	4.990.000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	44.000.000	110.275.000	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	44.000.000	110.275.000	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	44.000.000	110.275.000	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	208.983.750	175.898.750	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Plntu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	208.983.750	175.898.750	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	111.479.000	107.109.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	92.004.750	64.664.750	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5.500.000	4.125.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	460.600.000	460.600.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	460.600.000	460.600.000	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	360.600.000	374.020.000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	100.000.000	86.580.000	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	245.897.670	242.347.670	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	245.897.670	242.347.670	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	245.897.670	242.347.670	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12.273.790.000	12.266.790.000	
3.26.2.19.0.00.17.0000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	12.273.790.000	12.266.790.000	
3.26.2.19.0.00.17.0000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	12.273.790.000	12.266.790.000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	997.790.000	1.057.790.000	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	837.790.000	837.790.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	45.000.000	45.000.000	
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	53.000.000	53.000.000	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	739.790.000	739.790.000	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000	220.000.000	
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	65.000.000	65.000.000	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	95.000.000	155.000.000	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	10.526.000.000	10.459.000.000	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	262.000.000	572.000.000	
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	120.000.000	330.000.000	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	142.000.000	242.000.000	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	3.983.000.000	3.483.000.000	
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	3.983.000.000	3.483.000.000	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	5.100.000.000	5.100.000.000	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	5.100.000.000	5.100.000.000	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.181.000.000	1.304.000.000	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	644.000.000	644.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	537.000.000	660.000.000	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	750.000.000	750.000.000	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	750.000.000	750.000.000	
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	750.000.000	750.000.000	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	128.294.400	95.990.964	
2.16.2.20.2.21.14.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	128.294.400	95.990.964	
2.16.2.20.2.21.14.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	128.294.400	95.990.964	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	128.294.400	95.990.964	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	128.294.400	95.990.964	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	42.864.400	38.465.764	
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	22.900.000	11.357.500	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	31.178.000	20.994.700	
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	13.480.000	10.105.000	
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	17.872.000	15.068.000	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	683.994.000	1.194.025.200	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	683.994.000	1.194.025.200	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	683.994.000	1.194.025.200	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	49.032.000	149.032.000	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	49.032.000	149.032.000	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	49.032.000	149.032.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	390.000.000	790.000.000	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	390.000.000	790.000.000	
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	390.000.000	790.000.000	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	69.560.000	79.560.000	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	69.560.000	79.560.000	
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	69.560.000	79.560.000	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	126.260.000	126.260.000	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	77.690.000	77.690.000	
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	77.690.000	77.690.000	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	48.570.000	48.570.000	
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	48.570.000	48.570.000	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	49.142.000	49.173.200	
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	49.142.000	49.173.200	
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	49.142.000	49.173.200	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.213.036.237	3.287.400.598	
2.23.2.24.0.00.16.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.213.036.237	3.287.400.598	
2.23.2.24.0.00.16.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.213.036.237	3.287.400.598	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.689.819.837	2.764.184.198	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.000.000	63.576.680	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	29.386.300	
2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.000.000	29.863.220	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	4.327.160	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.264.319.837	2.345.083.855	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.259.319.837	2.340.244.055	
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.839.800	
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	1.000.000	
2.23.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	1.000.000	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.000.000	62.641.463	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	3.000.000	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.500.000	11.960.000	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000	3.000.000	
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	2.000.000	
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.500.000	2.500.000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000	40.181.463	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.500.000	115.882.200	
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000	40.000.000	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.000.000	74.382.200	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.000.000	176.000.000	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.000.000	110.000.000	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000	1.000.000	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.000.000	65.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	373.216.400	376.746.600	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	373.216.400	376.746.600	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	137.098.100	139.626.000	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	94.118.300	96.080.600	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	85.000.000	85.000.000	
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.000.000	56.040.000	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	150.000.000	146.469.800	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	146.469.800	
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	150.000.000	146.469.800	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	160.000.000	149.053.170	
2.23.2.24.0.00.16.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	160.000.000	149.053.170	
2.23.2.24.0.00.16.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	160.000.000	149.053.170	
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.000.000	34.449.440	
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.000.000	34.449.440	
2.24.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35.000.000	34.449.440	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	94.000.000	83.633.730	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	94.000.000	83.633.730	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	34.000.000	32.789.940	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000	50.843.790	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	31.000.000	30.970.000	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	31.000.000	30.970.000	
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	31.000.000	30.970.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	607.245.721	627.883.975	
2.09.3.25.0.00.10.0000	Dinas Pangan dan Perikanan	607.245.721	627.883.975	
2.09.3.25.0.00.10.0000	Dinas Pangan dan Perikanan	607.245.721	627.883.975	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	65.884.524	59.802.167	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	65.884.524	59.802.167	
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	65.884.524	59.802.167	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	488.674.147	529.937.983	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	152.800.000	196.813.500	
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	152.800.000	196.813.500	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	335.874.147	333.124.483	
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.171.100	5.125.770	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	322.703.047	322.100.773	
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000	5.897.940	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	52.687.050	38.143.825	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	52.687.050	38.143.825	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	52.687.050	38.143.825	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	13.819.365.248	15.637.501.194	
3.26.2.19.0.00.17.0000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	13.819.365.248	15.637.501.194	
3.26.2.19.0.00.17.0000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	13.819.365.248	15.637.501.194	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.331.760.354	5.040.408.150	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.000.000	27.000.000	
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000	7.000.000	
3.26.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	10.000.000	
3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.518.893.559	4.227.541.355	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.484.129.159	4.192.776.955	
3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34.764.400	34.764.400	
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	4.000.000	
3.26.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	4.000.000	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.992.200	156.272.200	
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.992.200	17.992.200	
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000	9.000.000	
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	2.415.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	10.585.000	
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	111.280.000	
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308.998.000	303.718.000	
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.998.000	1.998.000	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	297.000.000	294.000.000	
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.000.000	7.720.000	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.876.595	321.876.595	
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	219.115.795	219.115.795	
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.460.000	31.460.000	
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	71.300.800	71.300.800	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5.025.277.151	7.154.487.901	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.603.179.800	5.771.565.550	
3.26.02.2.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.603.179.800	5.771.565.550	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.422.097.351	1.382.922.351	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.420.097.351	1.382.922.351	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.938.642.743	1.893.920.143	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.938.642.743	1.893.920.143	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	23.000.000	20.000.000	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.885.642.743	1.856.333.943	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	10.000.000	6.500.000	
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	20.000.000	11.086.200	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	10.000.000	10.000.000	
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	10.000.000	10.000.000	
3.26.04.2.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	10.000.000	10.000.000	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.513.685.000	1.538.685.000	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.513.685.000	1.538.685.000	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	75.000.000	75.000.000	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1.293.685.000	1.318.685.000	
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	70.000.000	70.000.000	
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	75.000.000	75.000.000	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	25.874.876.526	25.859.119.818	
3.27.0.00.0.00.19.0000	Dinas Pertanian	25.874.876.526	25.859.119.818	
3.27.0.00.0.00.19.0000	Dinas Pertanian	25.874.876.526	25.859.119.818	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.907.362.793	12.994.412.236	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.800.000	91.147.400	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.800.000	43.141.200	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	48.006.200	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.154.353.993	12.274.424.256	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.089.353.993	12.213.811.216	
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	65.000.000	60.613.040	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.000.000	8.000.000	
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.000.000	8.000.000	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.000.000	215.631.780	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	6.000.000	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.000.000	66.696.780	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	15.935.000	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	7.000.000	
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	20.000.000	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	100.000.000	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.000.000	180.000.000	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000	35.000.000	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.000.000	85.000.000	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.000.000	60.000.000	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.208.800	225.208.800	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	191.244.400	191.244.400	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	3.000.000	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.964.400	30.964.400	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.115.952.020	7.434.593.917	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5.175.655.620	5.225.732.317	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5.175.655.620	5.225.732.317	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	970.376.800	1.117.376.800	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	230.188.400	212.188.400	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	740.188.400	905.188.400	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	154.919.600	154.919.600	
3.27.02.2.05.04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	104.919.600	104.919.600	
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	50.000.000	50.000.000	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	815.000.000	936.565.200	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	815.000.000	936.565.200	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.239.078.709	2.549.630.661	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	59.946.400	120.498.352	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	59.946.400	120.498.352	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	2.179.132.309	2.429.132.309	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	460.796.339	595.796.339	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.519.619.170	1.659.619.170	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	198.716.800	173.716.800	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.535.729.404	1.590.729.404	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	5.000.000	5.000.000	
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	
3.27.04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.204.599.004	1.204.599.004	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1.204.599.004	1.204.599.004	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	321.130.400	376.130.400	
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	170.000.000	225.000.000	
3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	151.130.400	151.130.400	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	145.000.000	180.000.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	145.000.000	180.000.000	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	10.000.000	10.000.000	
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	135.000.000	170.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	55.000.000	55.000.000	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	55.000.000	
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	55.000.000	55.000.000	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	876.753.600	1.054.753.600	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	876.753.600	1.054.753.600	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	246.565.200	244.565.200	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	410.000.000	625.000.000	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	220.188.400	185.188.400	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.000.000	2.000.000	
2.18.2.07.3.29.09.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	2.000.000	2.000.000	
2.18.2.07.3.29.09.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	2.000.000	2.000.000	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	2.000.000	2.000.000	
3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000	2.000.000	
3.29.05.2.01.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000	2.000.000	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	775.974.785	697.678.217	
2.17.3.30.3.31.15.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	775.974.785	697.678.217	
2.17.3.30.3.31.15.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	775.974.785	697.678.217	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	450.822.285	394.855.706	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	450.822.285	394.855.706	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	89.875.750	49.759.532	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	360.946.535	345.096.174	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	81.690.000	69.752.891	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	36.175.000	33.962.891	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	36.175.000	33.962.891	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.515.000	35.790.000	
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	45.515.000	35.790.000	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	24.362.500	22.862.500	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.362.500	22.862.500	
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	24.362.500	22.862.500	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	94.285.000	88.642.120	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	94.285.000	88.642.120	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	36.410.000	30.767.120	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	57.875.000	57.875.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	124.815.000	121.565.000	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	124.815.000	121.565.000	
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	72.000.000	69.000.000	
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	52.815.000	52.565.000	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	7.347.950.320	7.552.772.535	
2.17.3.30.3.31.15.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	7.347.950.320	7.552.772.535	
2.17.3.30.3.31.15.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	7.347.950.320	7.552.772.535	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	7.283.850.320	7.491.279.035	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	7.283.850.320	7.491.279.035	
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	268.900.000	341.349.194	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	250.200.000	245.424.395	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	55.050.544	217.737.581	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6.709.699.776	6.686.767.865	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	64.100.000	61.493.500	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	64.100.000	61.493.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	34.250.000	33.740.750	
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	29.850.000	27.752.750	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	69.417.204.445	46.201.025.951	
4.01.2.16.0.00.19.0000	Sekretariat Daerah	69.417.204.445	46.201.025.951	
4.01.2.16.0.00.19.0000	Sekretariat Daerah	69.417.204.445	46.201.025.951	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.208.970.535	36.736.987.507	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	484.334.939	260.309.711	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	215.462.955	116.103.608	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	116.219.908	66.449.003	
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	152.652.076	77.757.100	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.364.612.307	11.299.968.815	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.083.657.319	11.193.767.708	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	135.883.988	46.042.407	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	145.071.000	60.158.700	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	57.492.000	30.370.750	
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	57.492.000	30.370.750	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	170.240.000	31.917.999	
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	170.240.000	31.917.999	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.566.515.981	7.883.123.405	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	89.997.300	89.997.300	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.705.950	261.416.750	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	452.970.000	323.970.000	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	30.000.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	116.550.500	106.381.900	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	190.760.000	190.760.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.997.000.000	4.695.962.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.489.532.231	2.184.635.455	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.439.270.000	495.019.000	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	700.000.000	50.000.000	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	739.270.000	445.019.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.733.309.268	3.088.326.751	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.479.500	20.409.750	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.255.000.000	1.152.500.000	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	512.262.200	889.734.200	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	945.567.568	1.025.682.801	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.621.987.205	6.142.422.327	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.741.226.113	4.691.661.235	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.988.592	94.988.592	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135.500.000	240.500.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.650.272.500	1.115.272.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.261.893.145	4.242.164.145	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	177.806.125	177.806.125	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	450.000.000	530.271.000	
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000	40.000.000	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.594.087.020	3.494.087.020	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	1.220.106.296	1.005.920.595	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	153.213.719	149.950.250	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	661.345.127	538.148.528	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	168.941.786	149.763.100	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	75.107.952	55.310.216	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	161.497.712	112.748.501	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.289.209.394	2.257.444.009	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	1.060.396.940	1.037.843.486	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	629.068.266	610.644.125	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	599.744.188	608.956.398	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	29.529.156.494	8.086.696.380	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.000.162.465	734.808.562	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	118.940.628	79.530.000	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	263.917.000	191.368.012	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	617.304.837	463.910.550	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	27.802.503.605	6.690.212.725	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12.807.366.928	6.690.212.725	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	674.617.002	605.419.047	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	115.541.055	95.763.161	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	395.201.134	359.783.806	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	163.874.813	149.872.080	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	51.873.422	56.256.046	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	41.815.022	48.248.266	
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	10.058.400	8.007.780	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.679.077.416	1.377.342.064	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	568.206.432	478.453.333	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	149.051.581	106.768.732	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	316.944.470	272.808.334	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	102.210.381	98.876.267	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	281.605.970	266.654.548	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	116.901.220	107.477.552	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	81.791.300	76.263.546	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	82.913.450	82.913.450	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	598.942.682	514.078.991	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	272.193.672	226.390.893	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	178.001.302	147.247.109	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	148.747.708	140.440.989	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	230.322.332	118.155.192	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	125.933.532	44.658.532	
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	104.388.800	73.496.660	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	51.530.982.834	42.677.378.321	
4.02.0.00.0.00.20.0000	Sekretariat DPRD	51.530.982.834	42.677.378.321	
4.02.0.00.0.00.20.0000	Sekretariat DPRD	51.530.982.834	42.677.378.321	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.062.107.759	22.258.503.246	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.000.000	125.000.000	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	140.000.000	105.000.000	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	20.000.000	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.288.063.728	2.275.459.215	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.258.063.728	2.262.839.215	
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000	12.620.000	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	230.000.000	100.000.000	
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	230.000.000	100.000.000	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.308.078.926	3.227.078.926	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.000.000	30.000.000	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.500.000	36.500.000	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	183.000.000	158.000.000	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	142.578.926	127.578.926	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	130.000.000	120.000.000	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	275.000.000	255.000.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.500.000.000	2.500.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.930.000.000	460.000.000	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	450.000.000	150.000.000	
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	280.000.000	280.000.000	
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.350.000.000	30.000.000	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	979.000.000	934.000.000	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	222.000.000	222.000.000	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	295.000.000	250.000.000	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	80.000.000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	382.000.000	382.000.000	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.285.628.800	1.265.628.800	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	895.415.000	500.415.000	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	775.213.800	500.213.800	
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	20.000.000	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.000.000	95.000.000	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000	150.000.000	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	13.177.929.105	13.177.929.105	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	12.436.429.105	12.436.429.105	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	654.000.000	654.000.000	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	87.500.000	87.500.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	693.407.200	693.407.200	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	428.407.200	428.407.200	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	265.000.000	265.000.000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	22.468.875.075	20.418.875.075	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.900.000.000	1.800.000.000	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.900.000.000	1.800.000.000	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.104.635.000	3.754.635.000	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	830.584.000	830.584.000	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	830.584.000	830.584.000	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	822.584.000	822.584.000	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	822.584.000	822.584.000	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	798.299.000	448.299.000	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.332.980.800	832.980.800	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.332.980.800	832.980.800	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.711.300.000	3.611.300.000	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	2.425.750.000	2.425.750.000	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	965.000.000	865.000.000	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	290.550.000	290.550.000	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	30.000.000	30.000.000	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.042.950.000	4.042.950.000	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	45.000.000	45.000.000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.897.950.000	1.897.950.000	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	7.377.009.275	6.377.009.275	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7.377.009.275	6.377.009.275	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5.01	PERENCANAAN	6.844.129.906	6.328.581.301	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.5.05.5.05.37.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	6.844.129.906	6.328.581.301	
5.01.5.05.5.05.37.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	6.844.129.906	6.328.581.301	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.618.936.962	5.256.088.872	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.000.000	42.000.000	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.000.000	32.000.000	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.576.898.506	4.367.550.416	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.571.898.506	4.362.550.416	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	10.000.000	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	297.484.721	268.884.721	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	3.000.000	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000	67.000.000	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	7.000.000	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	20.000.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.484.721	161.884.721	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000.000	34.500.000	
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000	34.500.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.500.000	135.500.000	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	100.000.000	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.000.000	33.000.000	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	457.053.735	397.653.735	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	274.053.735	242.653.735	
5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	1.000.000	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	30.000.000	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	124.000.000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	574.198.345	555.793.785	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	466.750.590	450.686.180	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	22.853.650	21.693.745	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	34.608.470	34.608.470	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	19.887.500	17.591.300	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	54.175.000	47.531.600	
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	4.700.750	3.512.125	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	330.525.220	325.748.940	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	66.366.385	65.042.635	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	47.645.900	47.645.900	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	18.720.485	17.396.735	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	41.081.370	40.064.970	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	22.902.400	22.263.700	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	18.178.970	17.801.270	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	650.994.599	516.698.644	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	297.041.239	226.951.984	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	69.623.152	61.999.716	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	135.408.976	99.641.142	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	92.009.111	65.311.126	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	177.095.060	151.388.360	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	90.560.860	84.902.360	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	52.180.200	45.132.000	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	34.354.000	21.354.000	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	176.858.300	138.358.300	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	89.906.050	71.406.050	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	65.042.250	47.042.250	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	21.910.000	19.910.000	
5.02	KEUANGAN	187.055.016.535	189.720.002.814	
5.02.0.00.0.00.38.0000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	178.198.878.826	184.642.050.382	
5.02.0.00.0.00.38.0000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	178.198.878.826	184.642.050.382	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.961.441.571	9.644.046.559	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	15.000.000	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	7.500.000	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	7.500.000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.128.103.595	8.759.408.583	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.103.103.595	8.739.408.583	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000	20.000.000	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	14.000.000	
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	14.000.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.070.726	284.870.726	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.999.100	8.999.100	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.545.170	77.545.170	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.551.500	18.551.500	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.250.000	3.050.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.217.500	14.217.500	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.507.456	162.507.456	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.822.000	276.822.000	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	110.000.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.822.000	163.822.000	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.445.250	293.945.250	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.770.250	230.270.250	
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	5.000.000	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.675.000	23.675.000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	35.000.000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	169.934.966.330	173.792.980.233	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.225.606.467	1.177.349.699	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	57.624.675	67.624.675	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	57.624.675	67.124.675	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	20.112.400	20.112.400	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	24.558.600	24.558.600	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	874.924.167	850.229.774	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	154.022.825	110.960.450	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	36.739.125	36.739.125	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	214.509.600	235.396.576	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	50.000.000	43.000.000	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	58.464.400	88.740.376	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	50.000.000	50.000.000	
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	7.498.200	5.109.200	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	23.547.000	23.547.000	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	25.000.000	25.000.000	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	296.887.125	266.276.125	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	75.000.000	29.088.200	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	60.000.000	85.936.500	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	44.500.000	50.089.325	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala	100.000.000	89.364.300	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	17.387.125	11.797.800	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	168.097.963.138	171.972.957.833	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	163.097.963.138	168.353.471.033	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.000.000.000	3.619.486.800	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100.000.000	141.000.000	
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100.000.000	141.000.000	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.302.470.925	1.205.023.590	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.302.470.925	1.205.023.590	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	30.750.000	29.750.000	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	13.450.000	13.450.000	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	29.150.000	22.150.000	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	23.839.000	23.339.000	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	38.191.500	33.191.500	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.049.217.525	999.217.525	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	19.047.500	18.047.500	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	37.894.000	20.446.665	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	17.930.000	12.930.000	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	28.348.000	22.848.000	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	14.653.400	9.653.400	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.0.00.0.00.49.0000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.856.137.709	5.077.952.432	
5.02.0.00.0.00.49.0000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.856.137.709	5.077.952.432	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.887.065.321	4.189.357.611	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	6.837.000	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	2.696.000	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	4.141.000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.108.058.269	3.707.573.559	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.093.058.269	3.698.626.459	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	8.947.100	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.645.552	161.645.552	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000	60.000.000	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.802.900	13.802.900	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.250.000	2.250.000	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.217.500	14.217.500	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.375.152	66.375.152	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	333.000.000	86.940.000	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	58.000.000	52.640.000	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	34.300.000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.164.400	75.164.400	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000	37.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.164.400	35.164.400	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.197.100	151.197.100	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	121.197.100	136.197.100	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	5.000.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	969.072.388	888.594.821	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	969.072.388	888.594.821	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	109.008.688	127.579.888	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	36.700.000	32.408.300	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	107.474.200	133.035.450	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	375.558.700	306.137.000	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	246.106.000	184.569.383	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	94.224.800	104.864.800	
5.03	KEPEGAWAIAN	5.496.501.447	5.020.713.383	
5.03.0.00.0.00.39.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.496.501.447	5.020.713.383	
5.03.0.00.0.00.39.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.496.501.447	5.020.713.383	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.544.797.902	3.321.063.772	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.250.000	9.231.300	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.250.000	2.116.100	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.500.000	5.163.600	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.500.000	1.951.600	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.048.321.702	2.779.561.380	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.042.838.002	2.774.475.980	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.483.700	5.085.400	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.500.000	9.450.000	
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.500.000	9.450.000	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	116.500.000	132.094.892	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	2.000.000	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.000.000	27.170.285	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.500.000	18.500.000	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.200.000	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	6.500.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	72.724.607	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000	31.000.000	
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	31.000.000	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.162.400	133.662.400	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.164.400	27.664.400	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.998.000	75.998.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000	30.000.000	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.063.800	226.063.800	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.000.000	165.000.000	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.063.800	51.063.800	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.951.703.545	1.699.649.611	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	468.255.645	378.026.136	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	14.423.900	13.583.775	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	338.181.745	257.868.041	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	30.220.000	27.473.440	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	53.780.000	52.825.000	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	18.000.000	15.602.900	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	13.650.000	10.672.980	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	382.836.000	358.910.375	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	32.334.000	34.461.500	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	54.456.000	45.328.875	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	296.046.000	279.120.000	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.049.208.400	912.654.270	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	693.665.000	611.906.970	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	18.826.300	15.976.400	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	336.717.100	284.770.900	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	51.403.500	50.058.830	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	17.403.400	15.611.750	
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	15.000.100	11.205.880	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	19.000.000	23.241.200	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	479.173.700	473.899.700	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.5.05.5.05.37.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	479.173.700	473.899.700	
5.01.5.05.5.05.37.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	479.173.700	473.899.700	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	479.173.700	473.899.700	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	340.812.500	340.812.500	
5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	340.812.500	340.812.500	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	71.109.000	70.109.000	
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	71.109.000	70.109.000	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	67.252.200	62.978.200	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	67.252.200	62.978.200	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	7.367.015.057	7.774.259.158	
6.01.0.00.0.00.36.0000	Inspektorat	7.367.015.057	7.774.259.158	
6.01.0.00.0.00.36.0000	Inspektorat	7.367.015.057	7.774.259.158	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.481.739.322	6.303.983.423	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.500.000	15.500.000	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.500.000	5.500.000	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.159.321.547	4.966.565.648	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.153.821.547	4.961.065.648	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.500.000	5.500.000	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	153.000.000	153.000.000	
6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8.000.000	8.000.000	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	145.000.000	145.000.000	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	277.619.700	277.619.700	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.500	2.000.500	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.658.000	46.658.000	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.000.000	28.000.000	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.967.900	15.967.900	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	8.000.000	
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.993.300	16.993.300	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.000.000	160.000.000	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	463.223.000	463.223.000	
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	448.223.000	448.223.000	
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	15.000.000	15.000.000	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.376.275	109.376.275	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.349.475	45.349.475	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.026.800	63.026.800	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.698.800	318.698.800	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	234.298.800	249.298.800	
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.000.000	2.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	25.000.000	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.400.000	42.400.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	845.275.735	1.430.275.735	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	796.975.735	1.381.975.735	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	200.000.000	200.000.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	161.908.800	161.908.800	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	161.183.319	331.183.319	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	112.000.000	112.000.000	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	100.000.000	481.000.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	61.883.616	95.883.616	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	48.300.000	48.300.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	48.300.000	48.300.000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	40.000.000	40.000.000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	40.000.000	40.000.000	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000	10.000.000	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10.000.000	10.000.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10.000.000	10.000.000	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10.000.000	10.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
7.01	KECAMATAN	22.398.350.709	21.963.754.521	
7.01.0.00.0.00.21.0000	Kecamatan X koto	1.995.127.803	1.942.728.230	
7.01.0.00.0.00.21.0000	Kecamatan X koto	1.995.127.803	1.942.728.230	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.874.813.403	1.819.213.830	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.808.375	26.308.375	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.755.200	21.755.200	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.303.175	3.803.175	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	750.000	750.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.714.387.296	1.641.987.723	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.710.480.446	1.638.080.873	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.906.850	3.906.850	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.200.000	2.200.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.200.000	2.200.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.889.324	59.389.324	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.498.200	1.498.200	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.013.450	8.013.450	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.617.300	4.617.300	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.324.600	8.824.600	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.435.774	36.435.774	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.767.800	26.167.800	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250.000	250.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.464.000	12.964.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.053.800	12.953.800	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.760.608	63.160.608	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.260.608	51.260.608	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	4.400.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.500.000	7.500.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.264.400	25.764.400	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	750.000	750.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	750.000	750.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	22.199.400	22.199.400	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	21.449.400	21.449.400	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	750.000	750.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.315.000	2.815.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.315.000	2.815.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.430.000	9.430.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.430.000	9.430.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.430.000	9.430.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.100.000	8.100.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.100.000	8.100.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.100.000	8.100.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.630.000	35.630.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	35.630.000	35.630.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	18.000.000	18.000.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	17.630.000	17.630.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	42.890.000	44.590.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.890.000	44.590.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.205.000	3.205.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.315.000	4.515.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.000.000	16.500.000	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	20.370.000	20.370.000	
7.01.0.00.0.00.22.0000	Kecamatan Batipuh	1.874.154.267	1.656.334.053	
7.01.0.00.0.00.22.0000	Kecamatan Batipuh	1.874.154.267	1.656.334.053	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.683.516.067	1.477.492.253	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.958.715	7.413.715	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	900.000	900.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.045.000	5.500.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.013.715	1.013.715	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.517.044.753	1.279.224.539	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.514.668.753	1.276.848.539	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.376.000	2.376.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	900.000	2.000.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	900.000	2.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.153.199	58.878.999	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	542.500	542.500	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.682.700	6.682.700	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.198.600	3.198.600	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.087.341	6.813.141	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.642.058	41.642.058	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.210.200	37.095.400	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.000.000	13.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.710.200	23.595.400	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.249.200	92.879.600	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.250.000	68.250.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.420.000	1.420.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.579.200	23.209.600	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	88.873.800	76.529.400	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	59.794.600	52.565.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	29.894.800	27.780.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.899.800	24.785.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	29.079.200	23.964.400	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	29.079.200	23.964.400	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.000.000	8.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.000.000	8.000.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.000.000	7.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.000.000	1.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.226.000	6.226.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.226.000	6.226.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.226.000	6.226.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	33.121.400	33.121.400	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	33.121.400	33.121.400	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	22.588.400	22.588.400	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10.533.000	10.533.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	54.417.000	54.965.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54.417.000	54.965.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.664.000	4.664.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.952.000	4.500.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.000.000	18.000.000	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	29.801.000	27.801.000	
7.01.0.00.0.00.23.0000	Kecamatan Rambatan	1.519.728.030	1.536.538.768	
7.01.0.00.0.00.23.0000	Kecamatan Rambatan	1.519.728.030	1.536.538.768	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.332.862.387	1.364.796.125	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.588.300	29.588.300	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.005.200	2.005.200	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.554.100	26.554.100	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.029.000	1.029.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.160.580.049	1.147.390.787	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.158.489.099	1.145.299.837	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.090.950	2.090.950	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.925.000	1.925.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.925.000	1.925.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.162.238	53.867.238	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.045.200	1.045.200	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.918.100	6.918.100	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.922.138	1.922.138	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	500.000	500.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.403.500	9.108.500	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.373.300	34.373.300	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.206.800	43.056.800	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	700.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.000.000	16.850.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.506.800	25.506.800	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.400.000	88.968.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.400.000	80.968.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	3.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	52.637.600	52.637.600	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	28.173.200	28.173.200	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.000.000	3.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.173.200	25.173.200	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	24.464.400	24.464.400	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	24.464.400	24.464.400	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.000.000	11.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.000.000	11.000.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.000.000	9.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.000.000	2.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000	5.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	5.000.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.000.000	5.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	41.055.700	38.532.700	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	41.055.700	38.532.700	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	21.828.200	19.305.200	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	19.227.500	19.227.500	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	77.172.343	64.572.343	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	77.172.343	64.572.343	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25.964.400	25.964.400	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.000.000	3.000.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.601.443	15.101.443	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	28.606.500	20.506.500	
7.01.0.00.0.00.24.0000	Kecamatan Lima Kaum	1.599.732.260	1.680.931.235	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.0.00.0.00.24.0000	Kecamatan Lima Kaum	1.599.732.260	1.680.931.235	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.426.398.160	1.506.097.135	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.660.000	4.660.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	1.500.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.950.000	1.950.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.210.000	1.210.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.270.042.732	1.331.241.707	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.268.745.732	1.329.944.707	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.297.000	1.297.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.500.000	3.500.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.500.000	3.500.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.065.928	57.065.928	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	652.000	652.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.590.500	5.590.500	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.165.928	4.165.928	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	150.000	150.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.640.000	13.640.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.867.500	32.867.500	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.013.400	43.513.400	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000	200.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.700.000	18.835.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.113.400	24.478.400	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.116.100	66.116.100	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.116.100	62.116.100	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	2.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000	2.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	76.503.700	76.503.700	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	72.918.200	71.918.200	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	48.258.800	47.258.800	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.659.400	24.659.400	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.585.500	4.585.500	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.585.500	4.585.500	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.652.000	6.652.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.652.000	6.652.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.652.000	6.652.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.251.000	3.251.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.251.000	3.251.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.251.000	3.251.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	42.057.900	42.057.900	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	42.057.900	42.057.900	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	18.450.400	18.450.400	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	23.607.500	23.607.500	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44.869.500	46.369.500	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	44.869.500	46.369.500	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.410.000	1.410.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.670.000	15.170.000	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	29.789.500	29.789.500	
7.01.0.00.0.00.25.0000	Kecamatan Tanjung Emas	1.610.656.637	1.532.574.106	
7.01.0.00.0.00.25.0000	Kecamatan Tanjung Emas	1.610.656.637	1.532.574.106	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.401.252.138	1.327.669.607	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.965.603	28.965.603	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	407.695	407.695	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	28.244.803	28.244.803	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	313.105	313.105	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.226.326.519	1.128.243.988	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.225.893.819	1.127.811.288	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	432.700	432.700	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.000.000	1.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.212.750	37.212.750	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.562.700	1.562.700	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.047.500	8.047.500	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.072.000	3.072.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.289.300	2.289.300	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.041.250	21.041.250	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.536.066	77.536.066	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.607.433	27.607.433	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.800.000	20.800.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.128.633	29.128.633	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.211.200	54.711.200	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.211.200	48.211.200	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	4.500.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.000.000	2.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	61.882.166	61.882.166	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	300.000	300.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	300.000	300.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	58.083.666	58.083.666	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	29.659.333	29.659.333	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.424.333	28.424.333	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.498.500	3.498.500	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.498.500	3.498.500	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.945.000	9.945.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.945.000	9.945.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.681.000	7.681.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.264.000	2.264.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.051.900	8.051.900	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.051.900	8.051.900	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.051.900	8.051.900	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.142.100	29.142.100	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.142.100	29.142.100	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	22.979.600	22.979.600	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	6.162.500	6.162.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100.383.333	95.883.333	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.383.333	95.883.333	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	29.883.333	29.883.333	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.500.000	26.000.000	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	
7.01.0.00.0.00.26.0000	Kecamatan Lintau Buo	1.547.000.791	1.536.160.047	
7.01.0.00.0.00.26.0000	Kecamatan Lintau Buo	1.547.000.791	1.536.160.047	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.375.776.041	1.369.639.847	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.513.119	11.113.119	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.402.835	4.402.835	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.145.184	4.745.184	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.965.100	1.965.100	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.237.492.356	1.207.651.612	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.236.593.051	1.205.752.307	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	899.305	1.899.305	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.500.000	1.500.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.500.000	1.500.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.059.816	56.799.216	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	448.800	448.800	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.823.800	5.823.800	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.343.400	9.343.400	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.443.816	38.183.216	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.297.750	45.662.900	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	20.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.797.750	25.162.900	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.913.000	46.913.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.913.000	41.913.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	2.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000	3.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	74.647.750	72.743.200	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	750.000	750.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	750.000	750.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	71.897.750	69.993.200	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	70.397.750	68.493.200	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.500.000	1.500.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.000.000	2.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.000.000	2.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.615.000	5.615.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.615.000	5.615.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.865.000	4.865.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	750.000	750.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.534.500	1.534.500	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.534.500	1.534.500	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.534.500	1.534.500	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	42.937.000	42.337.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	42.937.000	42.337.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	18.373.000	18.373.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	24.564.000	23.964.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	46.490.500	44.290.500	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46.490.500	44.290.500	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.534.500	4.534.500	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.500.000	4.800.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.000.000	13.500.000	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	22.456.000	21.456.000	
7.01.0.00.0.00.27.0000	Kecamatan Sungayang	1.430.580.028	1.397.896.402	
7.01.0.00.0.00.27.0000	Kecamatan Sungayang	1.430.580.028	1.397.896.402	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.251.650.487	1.250.741.861	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.399.400	15.899.400	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.100.000	1.100.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.910.000	14.410.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	389.400	389.400	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.090.218.549	1.037.534.923	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.087.958.549	1.035.274.923	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.260.000	2.260.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.000.000	5.500.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.000.000	5.500.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.118.838	81.293.838	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.003.200	1.003.200	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.407.000	8.407.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.963.238	7.763.238	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.800.000	14.800.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.945.400	49.320.400	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.913.700	41.313.700	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.000	150.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	18.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.763.700	23.163.700	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.000.000	69.200.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	62.200.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	3.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.000.000	4.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	77.282.141	45.007.141	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	77.282.141	45.007.141	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	76.867.920	21.792.920	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	414.221	23.214.221	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.549.800	8.549.800	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.549.800	8.549.800	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.050.000	7.050.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.499.800	1.499.800	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	780.000	780.000	
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	780.000	780.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.04.7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	780.000	780.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38.805.000	38.805.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	38.805.000	38.805.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	19.255.000	19.255.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	19.550.000	19.550.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	53.512.600	54.012.600	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.512.600	54.012.600	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.050.000	1.050.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.375.000	3.375.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.000.000	13.500.000	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	31.087.600	36.087.600	
7.01.0.00.0.00.28.0000	Kecamatan Sungai Tarab	1.503.530.172	1.521.948.914	
7.01.0.00.0.00.28.0000	Kecamatan Sungai Tarab	1.503.530.172	1.521.948.914	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.355.019.106	1.376.803.848	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.814.850	7.814.850	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.874.850	1.874.850	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.975.000	3.975.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.965.000	1.965.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.205.451.460	1.203.870.202	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.202.901.460	1.201.320.202	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.550.000	2.550.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.710.000	1.710.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.710.000	1.710.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.031.363	60.397.363	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	751.500	751.500	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.215.800	5.215.800	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.825.000	4.825.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.172.500	9.538.500	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.066.563	40.066.563	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.401.433	45.401.433	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.000.000	20.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.801.433	24.801.433	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.610.000	57.610.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.110.000	49.110.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000	2.500.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000	6.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.630.666	47.630.666	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	46.798.666	46.798.666	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kecamatan			
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	23.399.333	23.399.333	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.399.333	23.399.333	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	832.000	832.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	832.000	832.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.794.900	8.794.900	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.794.900	8.794.900	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.794.900	8.794.900	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.366.000	3.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.366.000	3.000.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.366.000	3.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	36.755.000	36.755.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	36.755.000	36.755.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	23.755.000	23.755.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	13.000.000	13.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	48.964.500	48.964.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48.964.500	48.964.500	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.223.000	2.223.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.000.000	18.000.000	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	28.741.500	28.741.500	
7.01.0.00.0.00.29.0000	Kecamatan Pariangan	1.770.667.707	1.749.301.706	
7.01.0.00.0.00.29.0000	Kecamatan Pariangan	1.770.667.707	1.749.301.706	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.612.414.626	1.571.068.625	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.750.315	32.750.315	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.275.115	1.275.115	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	27.975.200	29.975.200	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000	1.500.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.438.449.601	1.368.007.075	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.436.873.076	1.365.507.075	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.576.525	2.500.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.200.000	1.200.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.200.000	1.200.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.802.210	64.854.335	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	974.079	974.079	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.682.350	7.734.475	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.050.211	6.050.211	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	150.000	150.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.176.100	11.176.100	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.769.470	38.769.470	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.947.500	37.899.800	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250.000	250.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.982.700	13.570.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.714.800	24.079.800	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.265.000	66.357.100	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.265.000	62.357.100	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	2.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.000.000	2.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	54.198.800	54.428.800	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	51.198.800	49.928.800	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	48.698.800	47.428.800	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.500.000	2.500.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.000.000	4.500.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.000.000	4.500.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.895.800	6.145.800	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.895.800	6.145.800	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.895.800	6.145.800	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.036.700	4.036.700	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.036.700	4.036.700	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.036.700	4.036.700	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	41.132.281	71.132.281	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	41.132.281	71.132.281	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	22.767.281	52.767.281	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	18.365.000	18.365.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	51.989.500	42.489.500	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	51.989.500	42.489.500	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.000.000	3.000.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.500.000	15.000.000	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	29.489.500	24.489.500	
7.01.0.00.0.00.30.0000	Kecamatan Salimpaung	1.482.932.293	1.488.854.889	
7.01.0.00.0.00.30.0000	Kecamatan Salimpaung	1.482.932.293	1.488.854.889	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.310.474.293	1.319.396.889	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.023.230	5.623.230	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.204.470	1.204.470	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.793.360	3.393.360	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.025.400	1.025.400	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.187.605.127	1.174.277.723	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.186.371.602	1.172.294.198	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.233.525	1.983.525	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.000.000	2.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.258.163	57.608.163	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	802.000	802.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.066.000	6.066.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.910.000	3.910.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.002.400	9.852.400	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.477.763	36.977.763	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.687.000	16.687.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.000	150.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	15.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.537.000	1.537.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.900.773	63.200.773	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000	46.300.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	2.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.900.773	14.900.773	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	76.680.000	76.680.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	300.000	300.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	300.000	300.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	74.198.000	74.198.000	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	48.840.000	48.840.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.358.000	25.358.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.182.000	2.182.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.182.000	2.182.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.364.000	9.364.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.364.000	9.364.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.064.000	9.064.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	300.000	300.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.864.000	3.864.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.864.000	3.864.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.864.000	3.864.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.931.000	34.931.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	34.931.000	34.931.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	19.431.000	19.431.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	15.500.000	15.500.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	47.619.000	44.619.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	47.619.000	44.619.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.000.000	3.000.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.000.000	13.500.000	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	26.619.000	28.119.000	
7.01.0.00.0.00.31.0000	Kecamatan Padang Ganting	1.470.235.713	1.418.249.184	
7.01.0.00.0.00.31.0000	Kecamatan Padang Ganting	1.470.235.713	1.418.249.184	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.360.259.168	1.310.222.639	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.059.150	29.959.150	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.242.200	1.242.200	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	26.717.700	27.617.700	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.099.250	1.099.250	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.187.522.363	1.116.585.834	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.185.088.298	1.113.101.769	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.434.065	3.484.065	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.140.000	4.140.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.140.000	4.140.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.574.255	64.574.255	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.210.000	1.210.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.107.350	6.107.350	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.106.655	4.106.655	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.142.500	21.142.500	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.007.750	32.007.750	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.477.800	40.477.800	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250.000	250.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.000.000	13.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.227.800	27.227.800	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.485.600	54.485.600	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.485.600	50.485.600	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	2.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.000.000	2.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	27.287.400	27.287.400	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	25.364.400	25.364.400	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	24.164.400	24.164.400	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.200.000	1.200.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.923.000	1.923.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.923.000	1.923.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.469.800	9.569.800	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.469.800	9.569.800	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.546.800	8.546.800	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.923.000	1.023.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.365.600	1.365.600	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.365.600	1.365.600	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.365.600	1.365.600	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.818.345	29.818.345	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.818.345	29.818.345	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	19.068.345	19.068.345	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10.750.000	10.750.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	41.035.400	39.985.400	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	41.035.400	39.985.400	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.155.000	2.605.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.200.000	3.200.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.914.700	14.414.700	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	19.765.700	19.765.700	
7.01.0.00.0.00.32.0000	Kecamatan Tanjung Baru	1.387.484.494	1.386.817.595	
7.01.0.00.0.00.32.0000	Kecamatan Tanjung Baru	1.387.484.494	1.386.817.595	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.257.206.194	1.261.220.495	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.192.470	6.192.470	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.849.825	1.849.825	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.831.825	2.831.825	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.510.820	1.510.820	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.123.142.143	1.102.475.244	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.120.251.343	1.099.584.444	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.890.800	2.890.800	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	760.000	760.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	760.000	760.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.414.281	38.514.281	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	443.600	443.600	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.758.881	5.758.881	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.521.300	3.521.300	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.990.500	7.990.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.400.000	20.800.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.040.000	41.441.200	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250.000	250.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.000.000	16.882.400	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.790.000	24.308.800	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.657.300	71.837.300	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.657.300	66.837.300	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000	2.500.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.500.000	2.500.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	29.615.600	29.134.400	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	450.000	450.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	450.000	450.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	28.265.600	27.784.400	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	27.515.600	27.034.400	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	750.000	750.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	900.000	900.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	900.000	900.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.570.300	8.570.300	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.570.300	8.570.300	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.120.300	8.120.300	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	450.000	450.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.580.000	8.030.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.580.000	8.030.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.580.000	8.030.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.076.000	32.076.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	32.076.000	32.076.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	17.326.000	17.326.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	14.750.000	14.750.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	51.436.400	47.786.400	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	51.436.400	47.786.400	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.468.400	2.468.400	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.000.000	1.850.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.000.000	13.500.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	29.968.000	29.968.000	
7.01.0.00.0.00.33.0000	Kecamatan Lintau Buo Utara	1.506.957.216	1.488.257.209	
7.01.0.00.0.00.33.0000	Kecamatan Lintau Buo Utara	1.506.957.216	1.488.257.209	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.341.204.716	1.330.104.509	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.299.900	12.204.900	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.120.000	2.755.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.379.900	7.649.900	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.800.000	1.800.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.147.984.505	1.109.284.498	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.146.464.680	1.107.764.673	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.519.825	1.519.825	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.850.000	3.850.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.850.000	3.850.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.609.046	68.513.646	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	743.000	743.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.445.300	6.445.300	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.855.000	4.855.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.059.500	13.059.500	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.506.246	43.410.846	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.828.600	37.193.600	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.200.000	11.200.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.128.600	25.493.600	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.632.665	99.057.865	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.233.265	72.293.465	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	2.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.399.400	24.764.400	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	74.042.800	72.138.200	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	450.000	450.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	450.000	450.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	73.142.800	71.238.200	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	48.593.800	47.323.800	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.549.000	23.914.400	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	450.000	450.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	450.000	450.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.427.000	7.427.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.427.000	7.427.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.977.000	6.977.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	450.000	450.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38.337.500	38.337.500	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	38.337.500	38.337.500	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	19.932.500	19.932.500	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	18.405.000	18.405.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44.750.000	40.250.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	44.750.000	40.250.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.494.000	2.494.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.000.000	13.500.000	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	24.256.000	24.256.000	
7.01.0.00.0.00.34.0000	Kecamatan Batipuh Selatan	1.699.563.298	1.627.162.183	
7.01.0.00.0.00.34.0000	Kecamatan Batipuh Selatan	1.699.563.298	1.627.162.183	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.564.986.694	1.497.556.379	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.799.250	30.564.400	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.399.250	25.364.400	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	4.300.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	900.000	900.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.389.192.194	1.297.991.079	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.387.212.094	1.294.810.979	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.980.100	3.180.100	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	900.000	900.000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	900.000	900.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.646.750	53.922.100	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000	500.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.548.850	6.548.850	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.821.400	3.821.400	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.564.000	12.839.350	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.212.500	30.212.500	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.799.250	36.164.400	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000	200.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	12.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.599.250	23.964.400	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.649.250	78.014.400	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.000.000	52.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000	2.500.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.149.250	23.514.400	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26.538.250	26.538.250	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	25.649.250	25.649.250	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	24.449.250	24.449.250	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.200.000	1.200.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	889.000	889.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	889.000	889.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.300.000	6.300.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.300.000	6.300.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.300.000	6.300.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.548.000	3.548.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.548.000	3.548.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.548.000	3.548.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	42.341.300	37.665.500	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	42.341.300	37.665.500	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30.577.300	25.901.500	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	11.764.000	11.764.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	55.849.054	55.554.054	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	55.849.054	55.554.054	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.817.600	6.817.600	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	1.500.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.000.000	13.500.000	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	32.031.454	33.736.454	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.526.589.630	4.494.698.744	
1.05.8.01.0.00.06.0000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.526.589.630	4.494.698.744	
1.05.8.01.0.00.06.0000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.526.589.630	4.494.698.744	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.257.905.230	1.241.014.344	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	1.500.000	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000	500.000	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.017.079.579	985.877.913	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.016.579.579	985.377.913	
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000	500.000	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.422.551	37.733.331	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	300.000	300.000	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.000.000	7.310.780	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.122.551	4.122.551	
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000	1.000.000	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	25.000.000	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.343.200	88.343.200	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	66.343.200	66.343.200	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000	21.000.000	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000	1.000.000	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.559.900	127.559.900	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.995.500	104.995.500	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	1.000.000	
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.564.400	21.564.400	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	50.000.000	50.000.000	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	50.000.000	50.000.000	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50.000.000	50.000.000	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.686.297.120	2.686.297.120	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.686.297.120	2.686.297.120	
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	812.684.400	1.812.684.400	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	873.612.720	873.612.720	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.000.000	2.000.000	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.000.000	2.000.000	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.000.000	2.000.000	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	16.322.880	1.322.880	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	16.322.880	1.322.880	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	16.322.880	1.322.880	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	514.064.400	514.064.400	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	514.064.400	514.064.400	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	40.000.000	40.000.000	

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 Pada setiap perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Plafon Anggaran per Perangkat Daerah
Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	+/-
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	425,464,313,860.00	449,102,775,225.00	23,638,461,365.00
2	Dinas Kesehatan	150,829,807,873.00	157,048,530,406.00	6,218,722,533.00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	125,852,328,732.00	136,433,340,909.00	10,581,012,177.00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	83,045,583,038.00	84,529,424,506.00	1,483,841,468.00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	11,868,994,157.00	11,632,026,299.00	(236,967,858.00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8,417,391,597.00	7,948,184,643.00	(469,206,954.00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,405,846,669.00	3,510,012,258.00	104,165,589.00
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3,526,589,630.00	4,494,698,744.00	968,109,114.00
9	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8,604,147,982.00	34,703,758,863.00	26,099,610,881.00

NO	PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	+/-
10	Dinas Pangan dan Perikanan	4,358,818,328.00	5,052,242,149.00	693,423,821.00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,984,882,795.00	4,156,134,656.00	171,251,861.00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19,240,827,651.00	20,094,550,956.00	853,723,305.00
13	Dinas Perhubungan	15,248,966,718.00	18,663,596,020.00	3,414,629,302.00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	5,416,812,688.00	6,065,270,141.00	648,457,453.00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	18,703,169,859.00	13,955,336,742.00	(4,747,833,117.00)
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	6,071,268,629.00	6,062,816,732.00	(8,451,897.00)
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,373,036,237.00	3,436,453,768.00	63,417,531.00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	26,093,155,248.00	27,904,291,194.00	1,811,135,946.00
19	Dinas Pertanian	25,874,876,526.00	25,859,119,818.00	(15,756,708.00)
20	Sekretariat Daerah	69,417,204,445.00	46,201,025,951.00	(23,216,178,494.00)
21	Sekretariat DPRD	51,530,982,834.00	42,677,378,321.00	(8,853,604,513.00)

NO	PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	+/-
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7,323,303,606.00	6,802,481,001.00	(520,822,605.00)
23	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	178,198,878,826.00	184,642,050,382.00	6,443,171,556.00
24	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	8,856,137,709.00	5,077,952,432.00	(3,778,185,277.00)
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5,496,501,447.00	5,020,713,383.00	(475,788,064.00)
26	Inspektorat	7,367,015,057.00	7,774,259,158.00	407,244,101.00
27	Kecamatan X koto	1,995,127,803.00	1,942,728,230.00	(52,399,573.00)
28	Kecamatan Batipuh	1,874,154,267.00	1,656,334,053.00	(217,820,214.00)
29	Kecamatan Rambatan	1,519,728,030.00	1,536,538,768.00	16,810,738.00
30	Kecamatan Lima Kaum	1,599,732,260.00	1,680,931,235.00	81,198,975.00
31	Kecamatan Tanjung Emas	1,610,656,637.00	1,532,574,106.00	(78,082,531.00)
32	Kecamatan Lintau Buo	1,547,000,791.00	1,536,160,047.00	(10,840,744.00)
33	Kecamatan Sungayang	1,430,580,028.00	1,397,896,402.00	(32,683,626.00)
34	Kecamatan Sungai Tarab	1,503,530,172.00	1,521,948,914.00	18,418,742.00

NO	PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	+/-
35	Kecamatan Pariangan	1,770,667,707.00	1,749,301,706.00	(21,366,001.00)
36	Kecamatan Salimpaung	1,482,932,293.00	1,488,854,889.00	5,922,596.00
37	Kecamatan Padang Ganting	1,470,235,713.00	1,418,249,184.00	(51,986,529.00)
38	Kecamatan Tanjung Baru	1,387,484,494.00	1,386,817,595.00	(666,899.00)
39	Kecamatan Lintau Buo Utara	1,506,957,216.00	1,488,257,209.00	(18,700,007.00)
39	Kecamatan Batipuh Selatan	1,699,563,298.00	1,627,162,183.00	(72,401,115.00)
	JUMLAH	1.299.969.192.850	1,340,812,179,178.00	40,842,986,328.00

Sumber : TAPD Kabupaten Tanah Datar

Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dapat dilihat ditabel 4.4

Tabel 4.4

Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2023

NO.	URAIAN	PERUBAHAN		+/-
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	+/-
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Belanja Pegawai	590,833,574,518.00	613,976,183,780.00	23,142,609,262.00
2	Belanja Barang dan Jasa	349,294,142,390.00	362,381,680,207.00	13,087,537,817.00

NO.	URAIAN	PERUBAHAN		+/-
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	+/-
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
3	Belanja Subsidi	575,000,000.00	575,000,000.00	-
4	Belanja Hibah	27,983,522,120.00	36,574,122,120.00	8,590,600,000.00
5	Belanja Bantuan Sosial	9,520,849,623.00	8,565,359,623.00	(955,490,000.00)
6	Belanja Modal	153,739,305,461.00	146,834,040,015.00	(6,905,265,446.00)
	a. Belanja Modal Tanah	-	410,000,000.00	410,000,000.00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47,238,201,757.00	46,804,493,097.00	(433,708,660.00)
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46,085,749,374.00	38,393,197,892.00	(7,692,551,482.00)
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	55,963,738,980.00	57,589,120,180.00	1,625,381,200.00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,178,615,350.00	3,602,228,846.00	(576,386,504.00)
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	273,000,000.00	35,000,000.00	(238,000,000.00)
7	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	3,619,486,800.00	(1,380,513,200.00)
8	Belanja Bagi Hasil	4,529,430,588.00	4,822,438,483.00	293,007,895.00
9	Belanja Bantuan Keuangan	158,493,368,150.00	163,463,868,150.00	4,970,500,000.00
	BELANJA DAERAH	1,299,969,192,850.00	1,340,812,179,178.00	40,842,986,328.00

Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Perubahan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.5

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada perubahan PPAS tahun anggaran 2023 penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan secara rinci diuraikan sebagai berikut :

Pada Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp87.710.300.868,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022, atau bertambah sebesar Rp27.460.300.868,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp60.250.000.000,00.

Rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

NO.	URAIAN	APBD TA 2022	RANCANGAN PERUBAHAN PPAS TA 2022	+/-
	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	60.250.000.000,00	87.710.300.868,00	27.460.300.868,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	60.250.000.000,00	87.710.300.868,00	27.460.300.868,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	60.250.000.000,00	87.710.300.868,00	27.460.300.868,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-



NO.	URAIAN	APBD TA 2022	RANCANGAN PERUBAHAN PPAS TA 2022	+/-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
	Pembiayaan Neto	59.250.000.000,00	86.710.300.868,00	27.460.300.868,00

BAB VI PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Batusangkar, Agustus 2023

BUPATI TANAH DATAR

ttd

EKA PUTRA, SE. MM